

LEADERSHIP

**PUBLIC ADMINISTRATION
MENUJU SOCIETY 5.0**

DR. R.M. GATOT HERY DJATMIKO

LEADERSHIP

PUBLIC ADMINISTRATION MENUJU SOCIETY 5.0

Dr. R.M. Gatot Hery Djatmiko



Leadership Public Administration Menuju Society 5.0

Indramayu © 2023, Penerbit Adab

Penulis: Dr. **R.M. Gatot Hery Djatmiko**

Editor : Prof. Dr. Sunarto, M.Si.

Desain Cover : Nurul Musyafak

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

CV. Adanu Abimata

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://Penerbitadab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

viii + 113 hlm. ; 14,5 x 21 cm

No. ISBN : 978-623-162-404-8

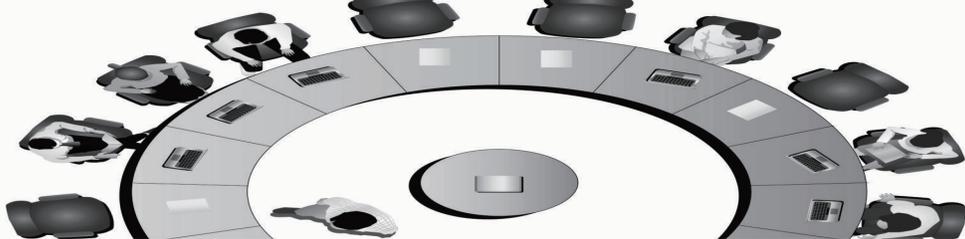
Cetakan Pertama, Oktober 2023



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved



KATA PENGANTAR

Buku ini yang mengupas tuntas tentang Kepemimpinan Dan Perubahan dalam bidang Administrasi Publik di Indonesia. Kepemimpinan telah lama menjadi fokus perhatian di berbagai kalangan, baik dalam dunia bisnis, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam era yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk memimpin dan mengelola perubahan menjadi semakin penting.

Mengajak pembaca untuk menjelajahi konsep-konsep dasar tentang kepemimpinan yang efektif serta bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi perubahan dalam berbagai konteks. Kami akan menggali prinsip-prinsip utama yang melandasi kepemimpinan yang berhasil, termasuk kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing tim menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi.

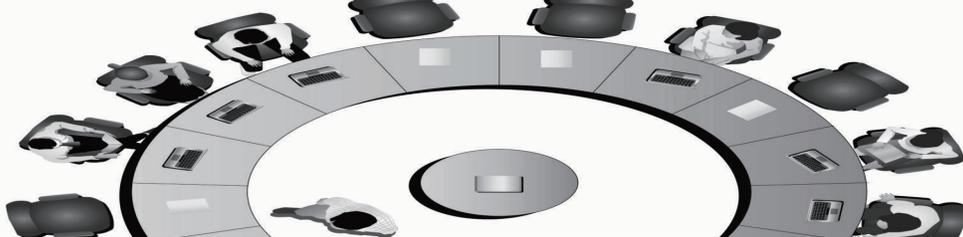
Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia saat ini penuh dengan tantangan dan peluang yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memiliki visi yang kuat untuk membentuk arah yang diinginkan dalam situasi yang tidak pasti.

Melalui buku ini, kami berharap pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang esensi kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan yang baik dapat membawa perubahan positif. Dengan pemahaman ini, diharapkan pembaca dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka sendiri dan membawa dampak positif dalam lingkungan mereka masing-masing.

Terima kasih telah memilih buku ini sebagai panduan Anda dalam memahami dunia kepemimpinan dan perubahan. Selamat menikmati perjalanan pengetahuan yang kami sajikan dalam halaman-halaman berikutnya.

Jakarta, Januari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB 1 PERUBAHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL..... 1

1.1. Dampak Perubahan Kepemimpinan Nasional Pada Arah Dan Perkembangan Negara..... 19

2.1. Konteks Politik Dan Sosial Saat Ini Di Indonesia 39

BAB 2 KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM SOCIETY 5.0..... 43

2.1. Visi Strategis..... 46

2.2. Inspirasi dan Motivasi..... 46

2.3. Keberanian Mengambil Risiko 47

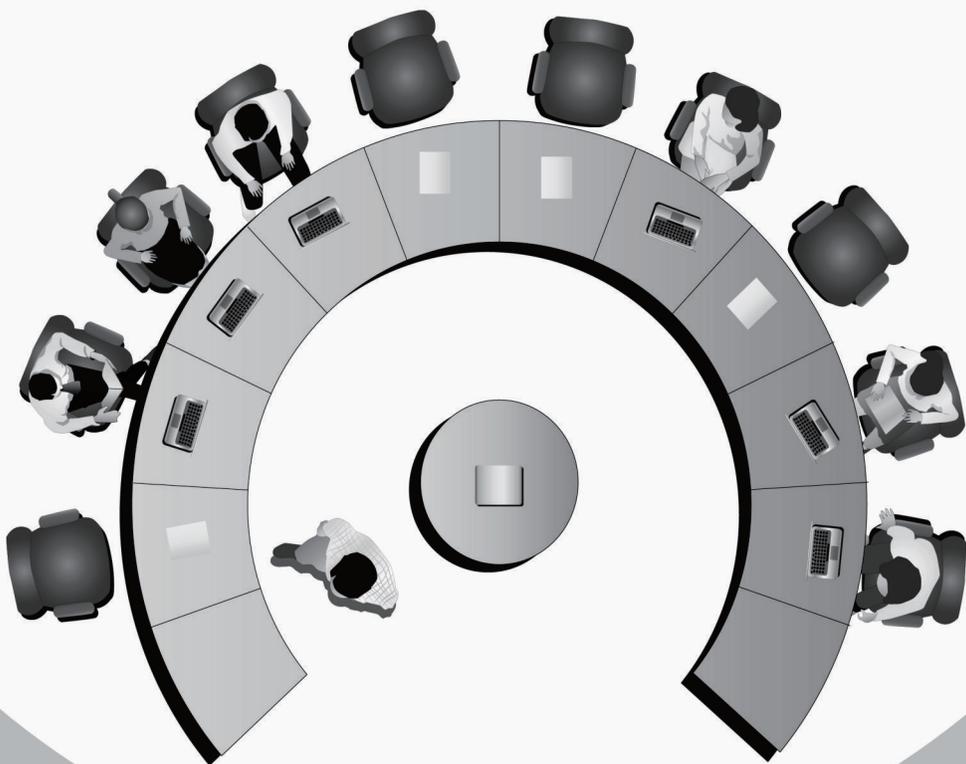
2.4. Penggunaan Teknologi Canggih 48

2.5. Kolaborasi Antar Departemen..... 49

2.6. Partisipasi Publik..... 51

2.7. Pendidikan dan Pengembangan SDM	52
2.8. Kepemimpinan Berbasis Nilai.....	53
2.9. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan	54
BAB 3 KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA	57
3.1. Kepemimpinan Nasional Indonesia, Era Orde Lama, Baru dan Reformasi	58
3.2. Profil, Latar Belakang dan Pengalaman Masing Masing Pemimpin	59
3.3. Perbedaan Gaya Kepemimpinan, Visi dan Agenda Kebijakan	62
BAB 4 KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN	67
4.1. Perubahan Kebijakan dan Prioritas.....	68
4.2. Prioritas Nasional Yang Terjadi Setelah Pergantian Kepemimpinan	70
4.3. Perubahan Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan Dan Kebijakan Luar Negeri.....	72
BAB 5 DAMPAK KEPADA MASYARAKAT DAN EKONOMI	77
5.1. Perubahan Kepemimpinan dan Pengaruhnya.....	78
5.2. Perubahan Kebijakan pada Sektor Ekonomi Dan Peluang Investasi	81
BAB 6 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN	85
6.1. Hubungan Internasional dan Diplomasi	86

6.2. Respon Pergantian Pemimpin	89
6.3. Dampak Jangka Panjang dari Perubahan Kepemimpinan	91
6.4. Pemimpin Baru Indonesia dan Tantangan Mendatang	93
BAB 7 KESIMPULAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB 1 PERUBAHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA

Di tengah kompleksitas tugas-tugas dan tanggung jawab yang melekat pada peran seorang Presiden, muncul individu yang terpilih untuk memimpin suatu bangsa. Kepemimpinan seorang Presiden bukanlah sekadar posisi politik, melainkan juga suatu tanggung jawab besar untuk mewujudkan visi dan cita-cita yang lebih besar bagi negara dan rakyatnya.

Seorang Presiden harus memiliki visi yang kuat tentang arah yang ingin dicapai oleh negara selama masa jabatannya. Visi ini menjadi panduan bagi kebijakan dan tindakan yang akan diambilnya, membentuk fondasi dari setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kepemimpinan Presiden tidak hanya tentang menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga tentang menginspirasi rakyat dan memandu bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Selain visi yang kuat, seorang Presiden juga harus memiliki kemampuan untuk mempersatukan masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam, Presiden berperan sebagai simbol kesatuan dan persatuan. Kemampuannya dalam mengatasi perbedaan dan membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda adalah salah satu karakteristik yang mendefinisikan kepemimpinannya. Penekanannya pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan inklusi akan membantu menciptakan lingkungan di mana semua warga negara merasa dihargai dan diwakili.

Kepemimpinan seorang Presiden juga diuji ketika bangsa menghadapi tantangan dan krisis. Dalam situasi sulit, kemampuannya untuk tetap tenang, mengambil keputusan tegas, dan merespons dengan cepat adalah kualitas yang sangat penting. Seorang Presiden yang mampu memimpin

dalam masa-masa sulit akan memperoleh kepercayaan rakyat dan meraih pengakuan atas keteguhan dan ketangguhannya.

Selain menghadapi tantangan internal, Presiden juga memiliki peran dalam hubungan internasional. Diplomasi menjadi bagian penting dari kepemimpinannya, yang membutuhkan kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, mempromosikan kerjasama lintas batas, dan mewakili kepentingan nasional dalam forum internasional.

Presiden tidak hanya dinilai dari hasil-hasil kebijakan atau proyek-proyek besar yang dicanangkan. Lebih dari itu, kepemimpinan Presiden tercermin dalam dampak jangka panjang yang ia tinggalkan pada masyarakat dan negara. Warisan seorang Presiden melampaui masa jabatannya, membentuk pola pikir, budaya, dan arah yang akan diikuti oleh generasi mendatang.

Dalam esensi yang sebenarnya, kepemimpinan seorang Presiden bukan hanya tentang jabatan atau kuasa. Itu adalah panggilan untuk mengabdikan kepada bangsa, untuk memimpin dengan kebijaksanaan, dan untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju masa depan yang lebih baik.

Presiden Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945:

a) Ir. Soekarno (1945-1967)

Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia dan juga proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dia memimpin selama periode awal pembentukan negara, termasuk dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pemerintahannya diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk konflik politik dan ekonomi.

Kepemimpinan merupakan proses dimana seseorang mengarahkan, membimbing serta mempengaruhi perilaku orang lain dalam menjalankan pekerjaannya. Gaya kepemimpinan sendiri merupakan norma ataupun aturan perilaku digunakan oleh seseorang atau pemimpin saat ia mencoba untuk mempengaruhi suatu perilaku orang yang lain. Salah satu teori dalam kepemimpinan adalah "*the Great Man Theory*". *Theory the great man* yaitu teori yang bersifat hebat, secara kasar bermaksud menjelaskan bahwa seorang pemimpin telah ditakdirkan dari lahir.

Teori ini menjadi populer selama abad ke-19. Mitologi dibalik beberapa pemimpin paling terkenal di dunia, seperti Abraham Lincoln, Julius Caesar, Mahatma Gandhi, dan Alexander Agung, membantu berkontribusi pada gagasan bahwa pemimpin besar dilahirkan dan bukan dibuat.

Analisis *the Great Man Theory* memilikir elevansi langsung dengan penelitian ini. Telah dicatat bahwa "melalui sebagian besar periode kekaisaran, orang Cina yang melek memiliki teori Orang Hebat tentang bagaimana peradaban mereka berkembang", dan dengan demikian, teori tersebut mungkin berdampak pada pola Cina saat ini. Oleh karena itu, spesifikasi, sudut pandang utama, dan kritik utama yang terkait dengan teori *Great Man* perlu dianalisis secara sangat rinci dalam lingkup tinjauan pustaka. Kritikus teori ini mencatat bahwa "kepemimpinan adalah seperangkat keterampilan dan praktik yang dapat diidentifikasi yang tersedia bagikita semua, bukan hanya beberapa pria dan wanita karismatik. "Oranghebat"-wanita atau pria-teori kepemimpinan benar-benar salah" (Kouzes dan Posner, 2008, p.32).

Selain itu, telah dikemukakan bahwa "keterampilan kepemimpinan dan kecerdasan matang dari waktu – waktu dan dalam kondisi yang sesuai "(Gallos, 2008, p.61), sehingga setiap individu dapat meningkatkan tingkat kualitas kepemimpinannya sendiri jika individu tersebut dihadapkan pada situasi yang relevan di bawah keadaan yang sesuai. Menurut the *Great Man Theory*, para pemimpin dilahirkan dengan seperangkat keterampilan dan sifat khusus yang membuat seseorang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Juga dikenal sebagai perspektif sifat kepemimpinan yang menunjukkan bahwa "individu tertentu memiliki karakter bawaan atau kepribadian khusus dengan kualitas yang membedakan mereka dari non-pemimpin "(Northouse, 2010, hlm.4).

Secara khusus ,karakter ini diyakini mencakup postur fisik seperti tinggi badan, berat badan, penampilan, kecerdasan, disposisi, dan lain-lain. Orang seperti ini seringkali memiliki karisma yang tidak dapat disembunyikan sehingga orang lain dapat dengan mudah menjadi pengikutnya.

Soekarno juga sosok yang sangat sempurna terlebih dari soal pemimpin negara Indonesia yang sangat begitu luas dan sangat beragam dengan seperti ini Soekarno juga sangat begitu berkarisma dan sangat berarti, akan tetapi dia juga seorang cendekiawan ataupun ideologi (Waoma,2020).

Indonesia memiliki sosok-sosok hebat yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Tidak ada orang Indonesia yang tidak mengenalnya. Ia dikenal sebagai individu yang tangguh, pejuang, berani, dan memiliki pemikiran yang matang. Tidak heran, ia disebut sebagai "Bapak Bangsa Indonesia". Ia menjadi Bapak Bangsa karena gaya kepemimpinannya yang dianggap

sukses membawa Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing. Gaya kepemimpinan merupakan hal yang krusial. Gaya kepemimpinan dapat menentukan bagaimana sebuah organisasi berjalan (Pentingnya Gaya kepemimpinan dan motivasi dalam suatu organisasi, 2019). Gaya kepemimpinan yang buruk dapat mengakibatkan kelumpuhan atau kemacetan dalam organisasi hingga sampai pada tingkat yang lebih parah gaya kepemimpinan yang buruk kemudian malah menghancurkan organisasi (Arvilona & Ermita, 2019).

Pemimpin memainkan peran dapat mempengaruhi karyawan atau staf di bawahnya guna mencapai tujuan dalam suatu organisasi (2014). Efektivitas organisasi salah satunya ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan tersebut dijalankan diluar faktor-faktor lain yang menentukan (Syahrizal,2020). Penelitian tentang gaya kepemimpinan Soekarno maupun kepribadiannya telah banyak ditulis (Hering, 2003; Ans, 2014; Wahyono, 2021). Tulisan-tulisan tersebut telah memaparkan bagaimana Soekarno menjadi presiden yang dengan segala kelebihanannya.

Akan tetapi, masih belum ada tulisan maupun penelitian yang menyimpulkan *the Great Man theory* memberikan penjelasan lebih komprehensif tentang gaya kepemimpinan Soekarno selama menjadi Presiden Republik Indonesia.

b) Dr. H. Mohammad Hatta (1945-1956)

Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain sebagai wakil presiden, dia juga memiliki peran penting dalam pembentukan negara dan menyusun dasar-dasar ekonomi dan politik Indonesia.

Mohammad Hatta merupakan tokoh penting pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Peran dan pemikiran Mohammad Hatta merupakan salah satu yang paling menonjol dari pemimpin bangsa Indonesia lainnya, baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Mohammad Hatta tidak hanya menyumbangkan pemikirannya, tetapi juga aksi nyata bagi bangsa Indonesia yang menyatakan pemikirannya melalui tulisan-tulisan (Firmansyah, 2010:17). Mohammad Hatta juga dikenal sebagai bapak pendiri negara dan dikenang sebagai sosok yang dekat di hati rakyat karena perjuangan dan sifatnya yang merakyat (Firmansyah, 2010:15). Wawasan intelektual, integritas dan karakter yang dimiliki oleh Mohammad Hatta telah diakui baik kawan maupun lawan politiknya. Mohammad Hatta menjadi tokoh besar Indonesia yang memiliki jasa kepada bangsa Indonesia yang tak dapat dilupakan.

Konsep kepemimpinan Mohammad Hatta sendiri yaitu jangan bertumpu pada satu pemimpin. Mohammad Hatta menyatakan "janganlah terlalu mendewa-dewakan seorang pemimpin dan janganlah kita bergantung nasib pergerakan kepada seorang pemimpin" (Salim, 1998:421-422)

Gaya kepemimpinan Mohammad Hatta dapat digolongkan kedalam tipe kepemimpinan rasional. Menurut pendapat Max Weber tipe kepemimpinan rasional adalah pemimpin yang diangkat karena kemampuan individu yang menyebabkan ia dapat diterima secara rasional karena sifat kepribadiannya yang jujur, kepastian, cerdas dan sifat-sifat terpuji lainnya (Soekanto, 1982: 311-314).

c) Soeharto (1967-1998)

Setelah meletusnya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan menjadi Presiden kedua Indonesia. Pemerintahannya ditandai dengan stabilisasi politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga disorot karena pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

Sejarah Indonesia telah mencatat nama Soeharto sebagai presiden kedua sekaligus presiden dengan masa jabatan paling lama di Indonesia. Soeharto mulai menjabat sebagai presiden ketika menggantikan Soekarno pada tahun 1966. Presiden Soeharto baru melepaskan tahta kekuasaannya pada tahun 1998, ketika terjadi gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di hampir seluruh pelosok Indonesia. Sepanjang kepemimpinan Soeharto Indonesia mengalami banyak kemajuan terutama dibidang ekonomi dan pembangunan. Meskipun demikian, banyak pula yang menganggap ketika Soeharto berkuasa banyak terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak bisa dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Banyak muncul pengertian soal pemimpin dan kepemimpinan, diantaranya pemimpin adalah figur sentral yang menyatukan kelompok, sedangkan kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dan dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial (Ambarita, 2013: 13).

Ketika tampil berkuasa, selain membumi hanguskan komunis dan simpatisan kiri lain, Soeharto dan Orde Baru juga menggolong-golongkan orang komunis itu dalam

kategorin A, B, C. pada Zaman Soeharto juga ada istilah bersih lingkungan, yang hanya boleh dipakai oleh mereka yang tidak punya kerabat komunis (Wibisono, 2012: 127). Ini jelas ada kemiripannya dengan cara Hitler tadi, walaupun digunakan oleh Soeharto terhadap korbanya, yaitu kalangan komunis dan kaum kiri lainya.

Menurut Ernesto Barcelona (2012: 176) saat mengenang sosok Presiden Soeharto mengatakan bahwa sosok Presiden Soeharto adalah sosok atau pribadi yang "rendah hati". Beliau selalu menjadi pendengar yang baik ketika menerima tamu-tamunya baik pada acara formal maupun non-formal. Hal ini juga dilakukannya ketika mengadakan temu-wicara atau dialog dengan rakyatnya, beliau selalu penuh perhatian mendengarkan keluhan mereka. Setelah itu dengan bahasa rakyat pula, Soeharto menjawab deyngan penuh kesabaran, dan selalu menguasai substansi pembicaraan. Selain itu AJF. Makiwawu (2012: 219-220) memberikan penuturan yang senada bahwa Presiden Soeharto adalah sosok atau pribadi yang "rendah hati". Soeharto adalah sosok yang sangat peduli kepada rakyat kecil dan mau belajar "jadi presiden".

Soeharto adalah sosok pemimpin yang cepat mau untuk belajar memahami segala kondisi yang dimanis dan terus berubah. Soeharto sendiri dalam setiap langkahnya meskipun beliau cenderung sebagai pemimpin yang otoriter tidak pernah malu dan enggan meminta masukan atau pendapat dari para menteri yang telah dipilihnya secara selektif. Menurut teori kontijensi Soeharto tergolong pemimpin yang deskriptif dimana pemimpin yang mampu beradaptasi atau berperilaku berbeda antara satu situasi dengan situasi lainya. Soeharto merupakan sosok yang memiliki prestasi dan menjadi sorotan

di mata dunia. Bagaimana tidak, dalam sejarah kepemimpinan otoriter rezim Orde Barulah yang paling lama bertahan dalam puncak kepemimpinannya. Soeharto memainkan strateginya yang sangat cantik untuk menggunakan kekuatan birokrasi, politik, dan militer untuk tetap terus mempertahankan kekuasaannya tanpa dicurigai oleh kalangan oposisi.

d) B.J. Habibie (1998-1999)

Habibie menggantikan Soeharto setelah lengser akibat tekanan reformasi dan protes mahasiswa. Pemerintahannya fokus pada reformasi politik dan pembukaan kebebasan media serta kebijakan ekonomi.

Bacharuddin Jusuf Habibie. Ketertarikan penulis untuk meneliti dan ingin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan dari seorang BJ Habibie pada saat lalu memimpin, karena bisa kita lihat dari track record seorang Habibie yang pada mulanya hanya seorang Ilmuwan Fisikiawan Pesawat Terbang lulusan terbaik di Jerman. Permasalahan yang dihadapi oleh seorang Habibie ketika menjabat menjadi seorang Presiden begitu kompleks, mencakup semua lapisan: sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Sistem yang ada tidak berjalan, malah penyebab keterpurukannya Negara pada saat itu ialah sistem itu sendiri yang tersumbat ungkap Fachry Ali dalam bukunya Esai Politik tentang Habibie(2013:205), tidak berjalan dari hilir ke hulu sebagaimana mestinya. Puncaknya para demonstran dari semua kalangan turun ke jalanan dan menuntut agar Presiden Soeharto segera turun dari kursi Presiden, yang telah menjabat selama 30 tahun lebih.

Gaya kepemimpinan seorang Habibie adalah cenderung untuk berperilaku pemimpin yang memberikan pertimbangan

sendiri dan rangsangan intelektual (Hasibuan:2001). Dalam hal ini biasa disebut Gaya Kepemimpinan transformasional, dianggap lebih revolusioner dan aktif. Melakukan pertimbangan sendiri yang dilakukan oleh Habibie pada malam sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden, dan telah membuat beberapa poin untuk nantinya akan langsung segera dijalankan oleh dirinya sendiri, para Menteri atau bawahannya(**B, J. Habibie :2006**)

Habibie telah berhasil meletakkan dasar-dasar bangun arsitektural ekonomi yang menjadi landasan perbaikan ekonomi menuju kesejahteraan sosial, yaitu sistem ekonomi pasar sosial yang diwacanakan pada waktu itu. Namun sangat disayangkan waktunya keburu habis. Gagasannya terbelengkalai, tidak dilanjutkan oleh Presiden penggantinya.(**Shahab, Achmad : 2008**)

Corak dari gaya kepemimpinan Habibie tidak banyak didasari atas kepentingan politik. Bahwa sesungguhnya, pencapaian Habibie dalam menangani masalah di negeri ini, tidak dengan upaya dirinya sendiri semata. Tetapi Habibie mencoba menjadikan dirinya model (role model) dalam pergerakan membawa perubahan dari rezim orde baru menuju reformasi tersebut. Habibie berkeinginan, agar pengikutnya dapat mengerti dan Habibie mengerti apa yang di inginkan pengikut agar perwujudan dari reformasi itu terlaksana. Maka dalam pelaksanaannya sebagai pemimpin bangsa, Habibie mampu termasuk dalam pemimpin visioner. Habibie mampu melihat ke depan bagaimana bangsa ini akan berkembang dan dengan kokoh dari bawah dapat bertahan dari permasalahan yang nantinya akan datang kembali. Sehingga, meskipun hanya kurun waktu satu tahun, Habibie

mampu dengan maksimal dan optimis mengendalikan kembali negara Indonesia, dibawah pemerintahan baru.

e) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001)

Abdurrahman Wahid adalah Presiden pertama yang dipilih secara langsung melalui pemilihan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pemerintahannya diwarnai oleh konflik politik dan sosial, serta isu separatisme di berbagai daerah.

Setiap pemimpin mempunyai kecenderungan untuk mempergunakan jenis kepemimpinan tertentu, penonjolan dapat dilihat dengan jelas pada saat ia mempergunakan jenis kepemimpinan yang tidak tepat pada situasi tertentu, itupun telah dilakukanya tanpa melawan kecenderungan pribadi, misalnya dalam keadaan darurat ia mempergunakan kepemimpinan yang demokratis. Dalam hubungan ini jenis kepemimpinan yang diterapkan itu dikatakan tidak tepat, oleh karena pada hematnya yang penting untuk saat itu ialah usaha-usaha untuk menguasai situasi dan untuk ini dibutuhkan penerapan ciri-ciri atau kepemimpinan yang dapat menjamin situasi itu.

Dengan kata lain kepemimpinan lebih diarahkan kepada penguasaan situasi dan pengikut, bukan sekedar memuaskan kecenderungan pribadi. Dari pemahaman itulah kemudian peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa tipe kepemimpinan Gus Dur adalah Kharismatik - Transformasional, hal ini didasarkan pada beberapa fakta serta data-data yang mengarah pada kecenderungan pola komunikasi serta dominasi tindakan yang pernah dilakukan Gus Dur pada saat menjabat dalam struktur politik.

Oleh karena itu, Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis tipe kepemimpinan politik Gus Dur, yang pertama adalah dengan menggunakan teori-teori kepemimpinan yang berhubungan dengan latar belakang historis Gus Dur, serta sebab musabab timbulnya kepemimpinan Gus Dur, data ini juga dapat digunakan sebagai penguat bahwa Gus Dur secara historis juga mempunyai latar belakang pemimpin yang kharismatis. Mengenai timbulnya seorang pemimpin, oleh para ahli teori kepemimpinan telah dikemukakan beberapa teori yang berbeda-beda. Namun demikian, apabila berbagai teori itu dianalisa, akan terlihat adanya tiga teori yang menonjol, ketiga teori itu ialah ; Pertama, teori Genetis (hereditary theory) yang mempunyai arti bahwa Inti dari pada ajaran teori ini tersimpul dalam sebutan yang mengatakan "leaders are born and not made". Para penganut teori ini menyetujui pendapat yang mengatakan pendapat bahwa seseorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan.

Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang yang ditempatkan, karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, satu kali kelak ia akan timbul sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua adalah teori Sosial yang Inti ajaran teori sosial ini ialah bahwa "leaders are made and not born", merupakan kebalikan inti teori genetis. Para penganut teori ini menyetujui pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Sedangkan yang ketiga, adalah teori ekologis yang pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan

berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan, bakat-bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimiliki itu.

Berdasar pada penelitian Naim, Abu (2014), Pola transformasional yang muncul sebenarnya berdasarkan kebijakan Gus Dur yang cukup visioner, seperti pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, membuka hubungan dagang dengan Israel, Pemisahan TNI-POLRI, Seringnya melakukan *reshuffle* kabinet, mengeluarkan Dekrit Presiden, seringnya melakukan kunjungan ke luar negeri, serta seringnya konflik Internal PKB. Meskipun Gus Dur dalam mengambil kebijakan tersebut cenderung mengandalkan sikap kharismatik yang dimilikinya, namun Gus Dur tidak pernah melakukan tekanan serta ancaman dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan militer, namun sikapnya yang terlalu berani (*courage*) serta kemauan kuatnya (*passion*) dalam memutuskan kebijakan yang dalam perspektifnya dianggap paling benar, hal itu merupakan bentuk tindakan yang telah membuat Gus Dur harus merelakan jabatannya karena kesalahannya sendiri dalam bertindak.

Sehingga perlu digaris bawahi, bahwa kharismatik - transformasional yang dimaksud dalam gaya kepemimpinan Gus Dur menurut penulis lebih mengarah pada membenaran pribadi yang kuat oleh Gus Dur sehingga menjadi egoisme politik yang kemudian

mengarah pada kebijakan yang kontroversial, kharisma yang dimiliki Gus Dur justru tidak dapat menjadi motivasi bagi para bawahannya untuk melaksanakan tugas. Akhirnya perubahan-perubahan yang diimplementasikan Gus Dur dalam bentuk kebijakan-kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang kontroversial manakala pola yang dibangun pada bawahannya hanya dengan menonjolkan kharismatik personal Gus Dur saja.

Kepercayaan diri yang terlalu kuat itulah yang mengarahkan pada kesimpulan bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh Gus Dur lebih cenderung ke arah pola komunikasi dalam kehidupan tradisional pesantren, yaitu pola kharismatik seorang santri terhadap kiaiinya, dan dalam hal ini Gus Dur menempatkan dirinya sebagai seorang kiai yang harus selalu dipatuhi.

f) Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Megawati, putri Soekarno, menjadi Presiden wanita pertama Indonesia. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, dia berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan stabilitas politik.

Pengukuhan Megawati Soekarnoputri menjadi professor kehormatan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia menjadi perbincangan masyarakat karena baru pertama kali terjadi di Indonesia. Megawati membuat karya ilmiah berjudul "Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004" serta memberikan pidato dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap. Kedua teks tersebut membahas masalah-masalah yang terjadi pada era kepemimpinan Megawati, kebijakan untuk mengatasi

masalah, hingga mencetuskan model “kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila”.

Wacana kepemimpinan yang dibentuk Megawati menarik untuk dibahas mengingat posisi Megawati yang merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian Irdiansyah (2021) menggunakan analisis wacana kritis yang dicetuskan Fairclough, dimana karya ilmiah dan pidato pengukuhan Megawati ditinjau dari sisi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pandangan Fuchs, Habermas, dan Foucault mengenai pengetahuan dan kekuasaan digunakan untuk membantu membongkar praktik diskursif serta dampaknya pada praktik sosial. Hasil analisis, Megawati sedang membangun citra positif sebagai pemimpin strategis yang berpengaruh hingga masa kini.

Model kepemimpinan yang digagasnya berfokus pada kemampuan pemimpin mempengaruhi orang lain dan mengindahkan peran rakyat dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan yang dibangun adalah Pancasila, yaitu sebagai landasan bagi setiap aktivitas sosial yang justru membuat nilai-nilainya tereduksi dalam sistem pengetahuan terkontrol. Dampak yang timbul adalah kontrol negara atas individu yang semakin ketat hingga ke tataran kognitif. Ketika ditarik ke momentum pemilihan umum 2024, wacana kepemimpinan digunakan untuk membantu Megawati dan kelompoknya agar dapat kembali berkuasa.

g) Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

SBY, seperti yang biasa dipanggil, adalah Presiden pertama yang terpilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pemerintahannya dikenal dengan fokus pada reformasi ekonomi, demokratisasi, dan penanganan bencana.

Merupakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan era demokrasi. Presiden SBY juga menegaskan cenderung mengalah, lebih memilih kompromi dan mufakat, karena SBY tidak ingin kepemimpinan yang diusungnya menjadi otoriter. SBY, seorang pemimpin demokratis, dalam mengambil keputusan selalu mengundang beberapa wakil bawahannya, namun keputusan tetap ada di tangannya. SBY adalah tipe pemimpin yang berhati-hati dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Prestasi penting yang tercatat pada masa kepemimpinan SBY adalah keberhasilan penyelesaian batas maritim Indonesia dengan dua negara sahabat, yakni Singapura dan Filipina.

Penelitian Jalal Asran (2021) Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), memberlakukan model sistem presidensial berdampingan dengan sistem multipartai. Sistem ini mulai berlaku pasca-pemilu tahun 2004 yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang memerintah selama dua periode, 2004-2014. Masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, sistem presidensial Indonesia relatif stabil, apa yang dikhawatirkan para ilmuwan politik model sistem presidensial yang demikian itu membuat peluang terjadinya political deadlock antara presiden dan DPR tidak terjadi, meskipun peluang itu terbuka, terutama dalam kasus bailout Bank Century.

Konflik antara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan DPR masa pemerintahannya hanya sebatas konflik dalam melaksanakan kekuasaan masing-masing. Model sistem presidensial pada periode ini, dapat menopang stabilitas demokrasi Indonesia. Situasi ini didukung oleh kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang mengutamakan politik akomodasi dan menghindari konflik terbuka dalam melaksanakan kekuasaannya. Implikasi model kepemimpinan presiden yang seperti itu, menghambat penyelesaian kasus korupsi politik berskala besar yang melibatkan pejabat negara.

h) Joko Widodo (2014-sekarang)

Jokowi adalah Presiden ketujuh Indonesia. Pemerintahannya telah mengutamakan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi ekonomi, dan program-program sosial.

Moch. Fauzie Said 2022 Strategi Kepemimpinan Krisis Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Untuk Pemulihan Ekonomi

Ketidakpasitian kondisi global saat ini dirasakan oleh setiap negara di dunia. Kondisi yang berubah-ubah dipicu oleh beberapa tantangan yang sedang terjadi saat ini dan membawa pengaruh besar bagi sikap pemimpin sebuah negara. Dengan melakukan analisis pemberitaan *online*, artikel ini ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan krisis di Indonesia digunakan untuk menghadapi tantangan global dalam pemulihan ekonomi. Artikel ini melakukan telaah teks media *online* yang terkait dengan fenomena yang diteliti, serta melakukan komparasi antara gaya kepemimpinan transaksional dan tranformasional yang dikaji dari beberapa

literatur *online* (melalui pemberitaan media *online*).

Kajian ini menemukan bahwa, Presiden Jokowi menggunakan dua gaya kepemimpinan dalam menghadapi tantangan global pemulihan ekonomi, yaitu gaya kepemimpinan transaksional pada aspek (1) reaksi pemimpin; (2) pemberdayaan budaya dan (3) kinerja manajemen, sedangkan pada aspek lainnya, yaitu: (1) dorongan motivasi kepada pengikut dan (2) mekanisme pemecahan masalah, Presiden Jokowi lebih menggunakan gaya transformasional. Dari hasil kajian ini disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Presiden Jokowi bersifat adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

1.1 Dampak Perubahan Kepemimpinan Nasional Pada Arah Dan Perkembangan Negara.

Perubahan kepemimpinan nasional dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan negara. Dampak dan perkembangan ini dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kebijakan dan gaya kepemimpinan yang diperkenalkan oleh pemimpin baru. Berikut adalah beberapa narasi yang tepat untuk menjelaskan dampak dan perkembangan tersebut:

- 1) **Stabilitas Politik:** Perubahan kepemimpinan dapat mempengaruhi stabilitas politik sebuah negara. Pergantian kepemimpinan yang lancar dan demokratis dapat menciptakan kestabilan, sementara pergantian yang konflik atau tidak demokratis dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik.
 - a) Pemikiran Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin, Soekarno salah satu tokoh dari

empat pendiri Republik Indonesia, pemikiran politiknya sangat luas, salah satu pemikiran politiknya tentang demokrasi yaitu demokrasi terpimpin menjadi kontroversi, mengingat di masa mudanya, Soekarno di kenal sebagai sosok pemikir politik yang sangat revolusioner, humanis dan progresif di zamannya. Sedangkan, pemikirannya tentang demokrasi terpimpin menempatkan sosoknya sebagai pemimpin yang dinilai otoriter oleh lawan-lawan politiknya. Tulisan ini merupakan studi pemikiran tentang Soekarno, khususnya pemikirannya tentang konsep demokrasi yang dia nilai sebagai konsep politik khas tradisi-budaya Indonesia.

Penelitian Argenti, Gili dan Istiningdias, Dini Sri (2017) Pemikiran politik Soekarno tentang demokrasi terpimpin bila dilihat relevansinya dengan konteks Indonesia saat ini dimana gelombang demokratisasi sudah menjadi sistem politik yang mapan eksistensinya dan tidak bisa ditawartawar lagi, merupakan suatu kekeliruan besar bila direlevansikan dalam konteks kekinian, sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem politik yang cenderung otoriter dan refresif. Sangat jauh berbeda dengan situasi Indonesia kontemporer sekarang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

b) Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. Menurut Penelitian Farchan, Yusa' (2021)

Pertama, kekuasaan politik Orde Baru yang yang bercorak otoriter setidaknya berakar dari lima sumber utama, yaitu; represi; kekuasaan material yang terkonsentrasi; wacana politik partikularistik; subordinasi bisnis terhadap negara; dan pengendalian birokrasi sipil dan militer. Kedua, dari aspek stabilitas, Indonesia di bawah Orde Baru dapat dikatakan stabil karena gejolak politik, ekonomi, dan sosial tidak terjadi, atau setidaknya jarang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, stabilitas Indonesia di bawah Soeharto dapat dikategorikan ke dalam Sistem Otoritarianisme Terbuka. Ketiga, jalan otoritarianisme sengaja dipilih Soeharto dengan tujuan untuk mempermudah agenda-agenda pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan stabilitas politik yang terkendali melalui format sentralisme politik untuk mempermudah alat kontrol bagi penyelenggaraan kekuasaan.

c) Indonesia Masa Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999).

Penelitian Ridwan (2015) Kebijakan B.J. Habibie selama masa pemerintahannya seperti mengatasi krisis ekonomi, mengatasi dinamika ketenagakerjaan, melaksanakan pemilihan umum, melakukan Reformasi ABRI.

Dan pelaksanaan sasaran kerja yang telah membuahkan tercapinya tuntutan masyarakat, yang dampaknya menjadikan perekonomian menjadi stabil dan kerusakan mulai mereda yang mana kedepannya diharapkan agar lebih baik lagi. Pada akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1999 merupakan berakhirnya masa jabatan B.J. Habibie setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak dan tidak mencalonkan sebagai Presiden. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa keadaan di Indonesia mulai mengalami perubahan yang signifikan setelah B.J. Habibie menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi akibat krisis ekonomi, namun setelah berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie telah memberikan kebebasan rakyat Indonesia untuk beraspirasi dan menyampaikan pendapat yang merupakan bentuk tuntutan rakyat kepada pemerintah.

d) Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Penelitian Putra, Sukarno Adam; Umamah, Nurul dan Sumarno (2019). Adapun Kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia yang selama ini telah dilakukan ada beberapa hal, yaitu sebagaimana berikut: 1) dengan melakukan supremasi sipil atas militer dan reposisi dalam tubuh internal militer, 2) menghapus peran sosial politik di tubuh TNI dan memfokuskan pada pertahanan dan keamanan saja, 3)

membubarkan dua institusi yang selama ini menjadi alat kontrol sipil daripada militer, yaitu lembaga Bakorstanas dan Litsus, 4) merealisasikan pemisahan TNI dan Polri yang memiliki lembaga dan tugas yang berbeda satu sama lainnya, 5) meningkatkan anggaran belanja militer untuk kesejahteraan prajurit TNI yang awalnya hanya 1,5% dari APBN, ditambah menjadi 5,5% dari APBN.

e) Kebijakan Politik Presiden Megawati (2001-2004)

Penelitian Nurjannah, Indah Rizki Aruma; Umamah, Nurul dan Marjono (2018) Kebijakan politik presiden Megawati terangkum dalam Stabilitas Nasional, yang didalamnya terdapat ketahanan pangan, ekonomi, dan pemberantasan Korupsi di Indonesia yang akan dijabarkan di bawah ini : Pemerintah Megawati ketika itu dinilai tidak memiliki sense of crisis. Buktinya masih saja lebih mementingkan kepentingan politik golongan. Politik golongan ini masih sangat kuat dan kental di kalangan birokrat pemerintahan, sehingga mengakibatkan pada permaian politik dan pelaksanaan KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme) semakin merajalela dan bermain teran-terangan. Agenda Reformasi yang ideal menjadi tolak ukuran keberhasilan bagi rapor pemerintahan Megawati, maka sudah pasti prestasi pemerintahan beliau jauh dari kata memuaskan. Kenyataannya selama berkuasa hampir 3 tahun, presiden Megawati masih belum mampu membasmi

tuntas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

f) Kebijakan Politik Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak high politics serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Penelitian Widiatmaja, Aji dan Albab, Ulil (2019) menemukan bahwa Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respon kolektif yang dicapai dalam forum-four multilateral.

Hal ini membuat kerjasama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak *inward dan outward looking* dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat

ASEAN sebagai zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menjaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis.

Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indoensia. Secara sederhana, kebijakan outward looking digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (inward looking).

g) Kebijakan Politik Joko Widodo (2014-2024)

Poros Maritim Dunia telah dicanangkan oleh Pemerintah Joko Widodo dan tengah diawasi implementasinya oleh DPRRI. Negara dari dalam dan luar kawasan Asia Tenggara memberikan respons mereka masingmasing yang beragam, terutama terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum yang tegas di lapangan. Penelitian, Nainggolan, Poltak Partogi (2015) menjelaskan lengkap mengenai kebijakan Poros Maritim Dunia pemerintah baru Indonesia under Joko Widodo dan respons negara lain terhadapnya, yang mengungkap reaksi, argumen, alasan, dan sikap yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera, Maluku, dan Papua melalui teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, *Focus Group Discussions* (FDG), dan wawancara mendalam terhadap para pengambil keputusan dan ahli pembangunan sektor maritim.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Temuan memperlihatkan respons negara lain yang tidak konsisten dalam kebijakan investasi mereka terhadap pembangunan infrastruktur, serta munculnya sikap yang kritis dan bahkan asertif terhadap penegakan hukum di laut Indonesia.

2) Perkembangan Ekonomi:

Kepemimpinan nasional yang efektif dapat memengaruhi perkembangan ekonomi negara. Kebijakan ekonomi yang baik dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian Hakim, Abdul (2012) menyatakan Setiap pemimpin dalam suatu negara memiliki ciri khas kepemimpinan yang akan mempengaruhi semua sektor yang terdapat di bawahnya. Pertumbuhan ekonomi pada awal kemerdekaan tidak berjalan dengan baik. Ketika pembenahan di sektor ekonomi semakin dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto, perekonomian meningkat dengan pesat. Selama pemerintahan Soeharto peningkatan terjadi dalam sektor pembangunan fisik. Pemerintahan selama 32 tahun ini menjadi semakin rapuh ketika dalam pemerintahan Soeharto terdapat KKN, diperparah oleh krisis moneter pada 1997-1998 hingga pertumbuhan ekonomi adalah minus 13,12% di tahun 1998.

Sejak peristiwa tersebut, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perbaikan dan kembali meningkat di masa pemerintahan megawati hingga masuk pada

pemerintahan SBY. Peranan presiden di sebuah negara menjadi penting karena presiden adalah pemimpin di dalam negeri dan menjadi wakil bangsa saat kunjungan ke luar negeri. Oleh karena itu, Presiden haruslah memiliki kecerdasan, sifat kepemimpinan yang mampu mengayomi rakyatnya, peka terhadap masalah-masalah baik masalah dalam negeri maupun masalah global dan mampu bertindak untuk menanggulangi dampak yang akan masuk sertaantisipasi terhadap apapun yang dapat mengancam rakyatnya.

Kemudian Penelitian tentang perekonomian di masa Joko Widodo oleh Bilmar Parhusip dan Windraty Ariane Siallagan (2015) menganalisis dampak yang dikaitkan langsung dengan sektor-sektor perekonomian, misalnya dampak terhadap sektor pariwisata, sektor perdagangan sehingga dapat diperoleh masukan yang lebih konkrit untuk penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang. Disamping itu, perlu juga mengaitkan penelitian mengenai paket kebijakan ekonomi dengan tujuan awalnya, misalnya untuk Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengaitkan paket kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap sektor riil di Indonesia: daya saing industri nasional, distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan, sektor pariwisata, serta kesejahteraan nelayan.

3) Hubungan Internasional:

"Pergantian kepemimpinan juga dapat mempengaruhi hubungan internasional sebuah negara. Kebijakan luar negeri yang berubah dapat memengaruhi

kerjasama internasional, perdagangan, dan diplomasi negara tersebut”.

Penelitian Sekar, Aurellia at.all (2023) Pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno serta bagaimana keadaan politik dalam negeri pada waktu itu, sedikit banyaknya telah memberikan dampak terhadap Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan kedekatannya dengan negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat terkhusus dengan pemerintah Amerika Serikat, yang dimana telah mempermudah jalan pemerintah Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat dalam NKRI. Selain dari pada itu juga pemerintah Amerika Serikat juga pernah memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia.

Terlepas dari kedekatan yang pernah terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia juga pernah mendekati diri dengan negara yang tergabung dalam Blok Timur. Dalam hal ini terkhusus dengan kedekatannya dengan pemerintah Uni Soviet, yang dimana pada waktu itu pemerintah Indonesia sedikit banyaknya juga telah menerima bantuan bantuan dari pemerintah Uni Soviet.

Politik luar negeri era Soeharto memiliki peranan besar dalam sistem perekonomian Indonesia. Soeharto membuka jalur perdagangan internasional sehingga banyak investor dari luar yang masuk dan berinvestasi di Indonesia. Dari tindakan tersebut, maka terlihat bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia di era kepemimpinannya adalah mencari bantuan asing demi

merehabilitasi ekonomi. Rakyat menjadi makmur tanpa kekurangan sandang pangan. Maka, arah politik luar negeri era Soeharto lebih menekankan pada perbaikan perekonomian dan pembangunan merupakan mantra pada era kepemimpinannya.

Meskipun perekonomian bersangsur-angsur membaik, akan tetapi justru menyebabkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin terlihat semakin kontras. Tujuan adanya investor asing adalah untuk menstabilkan perekonomian. Akan tetapi justru hal tersebut menjadi kerugian bagi Indonesia. Akibatnya muncul berbagai pergolakan dalam negeri. Dari sinilah mulai muncul peranan dari militer dalam era kepemimpinan Soeharto. Militer digunakan untuk memberantas pergolakan-pergolakan yang ada demi tujuan stabilitas politik dan keamanan bangsa dan negara Indonesia maupun sebagai perwujudan politik luar negeri Indonesia.

Sejak beralihnya pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998, dibawah pemerintahan Presiden Habibie, Indonesia memulai perjalanannya menuju demokrasi. Legitimasi kebijakan Habibie pada masa pemerintahannya cenderung lemah karena adanya transformasi pemerintahan secara transisi, kritik dari berbagai pihak nasionalis dan oposisi Habibie pada saat itu. Presiden Habibie dianggap sebagai pewaris rezim yang otoriter dan efektif oleh berbagai pihak, namun dilain sisi, ia juga terbukti memiliki semangat demokratis yang tinggi.

Meskipun banyak yang menganggap kebijakan-kebijakan Habibie sebagai kebijakan yang kontroversial

dan menimbulkan berbagai perbedaan pendapat pro dan kontra, kebijakan-kebijakan tersebut telah membentuk wajah dari sistem politik Indonesia yang demokratis, hingga hari ini, sebagai negara demokrasi peringkat ketiga di dunia.

Pada rezim Presiden Abdurrahman Wahid, identitas politik luar negeri Indonesia cenderung mengarah pada prinsip rasionalitas, dengan meletakkan presiden sebagai aktor dominan. Presiden melakukan hubungan luar negeri berdasarkan kepentingan, tanpa memandang blok dan latar belakang negara yang diajak kerja sama, dari segi apa pun, kecuali dari nilai yang menguntungkan. Selagi suatu negara dianggap memiliki potensi yang mampu memberikan keuntungan positif bagi Indonesia dan mampu membantu Indonesia menyelesaikan permasalahannya, hubungan luar negeri pun bisa dijalin. Hanya saja, arah dari kebijakan tersebut, dianggap samar.

Pada rezim Presiden Megawati Soekarno Putri, identitas politik luar negeri Indonesia mengarah pada pembenahan pemerintahan melalui proses demokratisasi. Megawati cenderung menjadi sosok yang taat dan patuh terhadap birokrasi serta konstitusi sehingga langkah yang diambil banyak merujuk pada tata aturan pemerintahan yang ada. Dalam prakteknya, presiden tidak memegang peran dominan, dan justru banyak menyerahkannya pada menteri luar negeri, sejalan dengan amanat Undang-Undang. Arah politik luar negeri Indonesia juga masih tidak memiliki ketegasan, karena cenderung patuh terhadap pihak lain, yang dianggap memiliki bargaining position lebih tinggi, seperti IMF. Indonesia cenderung

lebih dekat dengan blok barat, yang dianggap banyak membantu pemulihan stabilitas nasional Indonesia, sekalipun dengan mengajukan persyaratan khusus untuk dipatuhi Indonesia.

Pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, identitas politik luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah mengandalkan pada diplomasi soft power yang cenderung menggambarkan lemahnya kedaulatan dan ketegasan Indonesia. Namun demikian, berbagai upaya ini tak lain bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, sekalipun dengan jalan penundukan diri terhadap tuntutan global. Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dan tindakannya terhadap kondisi global dan pihak lain, sehingga konektivitas tercipta dan prinsip *million friends*, *zero enemy* dapat terwujud.

Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memasuki era baru yang memiliki corak atau watak tersendiri berdasarkan karakteristik pribadi Presiden Jokowi. Politik luar negeri Indonesia dirumuskan dan diperjuangkan yang berdasarkan pada prinsip kemandirian yang berlandaskan pada semboyan Tri Sakti, yakni: Berdaulat dalam bidang politik; berdikari dalam bidang ekonomi; dan berkepribadian kebudayaan. Dan terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri Indonesia, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

4) Pemberantasan Korupsi dan Kepemimpinan yang Bersih:

“Pemimpin baru sering kali berjanji untuk memberantas korupsi dan memperkenalkan kepemimpinan yang bersih. Keberhasilan mereka dalam melaksanakan ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara”.

Penelitian Shallahudin, M. Salman (2022) menjelaskan bahwa; Pembentukan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang menghasilkan dibentuknya PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang berfungsi menangani data laporan kekayaan pejabat negara, dan Keppres No. 275 tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Soeharto (Orde Baru) Pidato Soeharto 16 Agustus 1967 dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). pembentukan komite empat, hingga menjalankan Operasi Tertib (OPSTIB). B.J. Habibie UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Undang-undang ini kemudian membentuk KPKPN, KPPU, KOMISI OMBUDSMAN. Gus Dur Dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) sebelum akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Agung.

Megawati Sempat terjadi ketidakpercayaan pemberantasan korupsi yang tidak kunjung selesai yang kemudian ditanggapi dengan UU. No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan UU sebelumnya dan UU No. 32 tahun 2002, kemudian membentuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Susilo Bambang Yudhoyono Selain melanjutkan upaya pemerintahan sebelumnya dalam

upaya pemberantasan korupsi, beliau juga membentuk Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Joko Widodo Kebijakan pemberantasan korupsi dalam Nawacita prioritas kedua dan keempat, yang berisi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemulihan kepercayaan publik pada institusi demokratis negara melalui reformasi birokrasi, dan reformasi lembaga, serta upaya penegakan hukum. Dampak korupsi berkepanjangan Kita telah mengetahui korupsi selalu membawa hal negatif yang selalu membuat kerugian negara kian hari makin bertambah, diantara dampak yang paling terlihat adalah aspek ekonomi. Dari segi ekonomi korupsi menyebabkan: Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada sebuah negara melambat. Tingkat investasi yang menurun. Bertanggung jawab pada naiknya tingkat kemiskinan. Arus distribusi pada pendapatan mengalami ketimpangan dan jarak yang jauh.

Dari beberapa pernyataan di atas mengindikasikan bahwa dampak yang dibawa dalam bidang ekonomi saja tidaklah kecil, sehingga kita perlu keseriusan dalam menangani perkara ini, karena jika ekonomi terdampak maka sektor yang lain pasti juga mengalami hal yang sama. Pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi Dalam perkara penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong lemah, sementara kasus korupsi yang ada jumlahnya besar.

Pemerintah seolah kehilangan kekuatan melawan koruptor, dengan bukti beberapa kasus yang tidak selesai dan hukuman yang dirasa belum memberi efek

jera, dengan fakta banyaknya korupsi yang masih terjadi. Upaya mencegah korupsi: Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi memiliki andil yang penting.

Perlu dibentuk LSM yang efektif dalam menangani kasus korupsi sehingga kontribusinya mampu mendorong kasus semacam ini tidak terus tumbuh dan menjadi permasalahan berkepanjangan. Pendidikan politik dan anti korupsi kepada masyarakat sangat diperlukan terutama peran serta partai politik dalam mewujudkan negara demokratis yang tidak korup. Rekrutmen dan kaderisasi politik yang kredibel bukan hanya dicari dari kalangan yang memiliki dana saja, sehingga kedepan memiliki potensi korupsi untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia:

“Pemimpin baru dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan sosial yang diperkenalkan dapat memengaruhi kualitas hidup warga negara dan menghormati hak-hak dasar mereka”.

Penelitian Fazli Rachman. At. All.(2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Daerah perbatasan memiliki potensi terjadinya kerentanan masyarakat penerima manfaat dari

pembangunan dan pemberdayaan kawasan. Jarak dan isolasi daerah berimplikasi pada akses pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Realisasi mandat atas peran Kecamatan dalam UU Pemda dan PP Kecamatan sedapat mungkin dapat didorong untuk memastikan pembangunan berbasis HAM terwujud. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berfokus pada peningkatan kapasitas aktor pembangunan berbasis HAM di wilayah Kecamatan Besitang.

PKM ini dilaksanakan dengan menggandeng mitra Pemerintahan Kecamatan Besitang untuk mewujudkan pembangunan berbasis HAM. PKM ini dilaksanakan dengan melalui tahap perencanaan, pelatihan, dan pendampingan. Peserta PKM terdiri segmentasi penting terkait tata kelola Pemerintahan Kecamatan Besitang. PKM dirancang melalui pendekatan partisipatif dengan paradigma pembangunan masyarakat (*people centered development*).

Hasil pelaksanaan PKM peningkatan pemahaman dan keterampilan guna mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pembangunan berbasis HAM di Kecamatan Besitang. Pemerintah dapat memahami dan mengintegrasikan standar dan prinsip HAM dalam pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi di wilayah pemerintahannya. Warga dapat memahami partisipasi secara konseptual, bentuk dan mekanisme untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

6) **Perkembangan Sosial dan Budaya:**

“Kepemimpinan nasional juga dapat memengaruhi perkembangan sosial dan budaya negara. Kebijakan dalam bidang pendidikan, budaya, dan agama dapat membentuk nilai-nilai dan norma dalam masyarakat”.

Penelitian **Salman Yoga S (2018)**. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkaitan langsung dengan masyarakat sehingga membentuk wacana publik. Kebudayaan Indonesia yang merupakan perkawinan dari seluruh kebudayaan nasional mengalami proses interaksi dan akulturasi dalam waktu yang panjang sehingga membentuk kebudayaan baru. Teknologi membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menimbulkan persoalan atau dampak bagi kebudayaan itu sendiri.

Memacu tingkat perubahan dan pergeseran pola hidup dari pola yang mengandalkan komunikasi langsung dengan komunikasi menggunakan media, tergesernya kearifan lokal dalam kontek adat serta kebudayaan lebih luas. Makalah ini membahas bagaimana Islam sebagai sumber nilai dan ajaran bagi umatnya merangkum seluruh hajat dan aturan hidup pemeluknya. Teknologi dan kebudayaan tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban yang mempunyai konsep agama dan negara. Bagaimana konsep ini menjadi bagian yang urgen dalam perubahan sosial budaya kaitannya dengan Dakwah Islam dan kemaslahatan umat.

Perubahan sosial budaya masyarakat sebagai akibat kemajuan Teknologi Komunikasi dan media informasi dalam setiap zaman tidak dapat dihindari. Eksistensi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sebaik mungkin adalah alternatif bijak, memanfaatkannya sebagai sarana dan media dalam meningkatkan kualitas ilmu adalah solusi yang patut ditempuh oleh segala kalangan.

Dengan demikian kearifan budaya dengan segala nilai-nilainya akan tetap terjaga dan lestari. Karena efek media kemajuan media dan Teknologi komunikasi kaitannya dengan perubahan sosial tidak serta merta harus merubah struktur sosial. Demikianpun dengan sisi kehidupan beragama dan hubungan/interaksi antar sesama. Justru dengan kemajuan Teknologi Komunikasi seharusnya justru kehidupan sosial dan budaya semakin dapat dikembangkan. Dengan jalan inilah segala arus perkembangan teknologi dapat diatasi. Bukan malah memusuhinya apalagi menafikannya.

7) Keamanan dan Pertahanan:

“Kepemimpinan baru sering memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan negara. Mereka dapat mempengaruhi anggaran militer, kebijakan luar negeri, dan respons terhadap ancaman keamanan”.

Penelitian Muhammad Irfan Hilmy dan Rama Halim Nur Azmi (2021). Pandemi COVID-19 saat ini telah meningkatkan interaksi di dunia maya (cyberspace) terutama dalam arus data dikarenakan adanya pola kebiasaan baru yakni pekerjaan dan pembelajaran

dilaksanakan secara daring. Tingginya intensitas interaksi di cyberspace berkorelasi lurus dengan tingginya angka serangan siber. Menurut data dari BSSN dalam rentang Januari hingga April 2020, serangan siber di Indonesia mencapai angka 80 juta.

Tanpa adanya perlindungan yang jelas maka serangan tersebut dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pertahanan dan keamanan cyberspace Indonesia dan mengkonstruksikan konsep pertahanan dan keamanan negara dalam cyberspace. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konsep.

Dengan adanya peningkatan aktivitas dalam dunia maya yang berkenaan dengan perlindungan data sehingga perlindungan khusus terkait data dan tentunya mengancam kedaulatan negara oleh karenanya dalam rangka mengupayakan usaha pertahanan dan keamanan negara di cyberspace selain diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur terkait hal tersebut juga diperlukan adanya perjanjian timbal balik antara Indonesia dengan Negara lain untuk mengatasi serangan-serangan siber yang pelakunya berada di negara lain. Instrumen tersebut diperlukan untuk menciptakan langkah persuasif dan diplomatis untuk memperkuat hubungan kedua negara sehingga membuka ruang kedamaian bagi kawasan maupun global.

8) Partisipasi Politik:

“Pemimpin baru dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Mereka dapat mendorong atau menghambat partisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum”.

Dalam semua kasus, penting untuk diingat bahwa dampak dan perkembangan yang disebabkan oleh perubahan kepemimpinan nasional tidak selalu segera terlihat. Mereka dapat berkembang selama beberapa tahun atau bahkan dekade. Selain itu, evaluasi dampak yang akurat memerlukan analisis yang lebih mendalam dan data yang cukup untuk memahami perubahan dalam konteks yang lebih luas.

1.2 Konteks Politik Dan Sosial Saat Ini Di Indonesia.

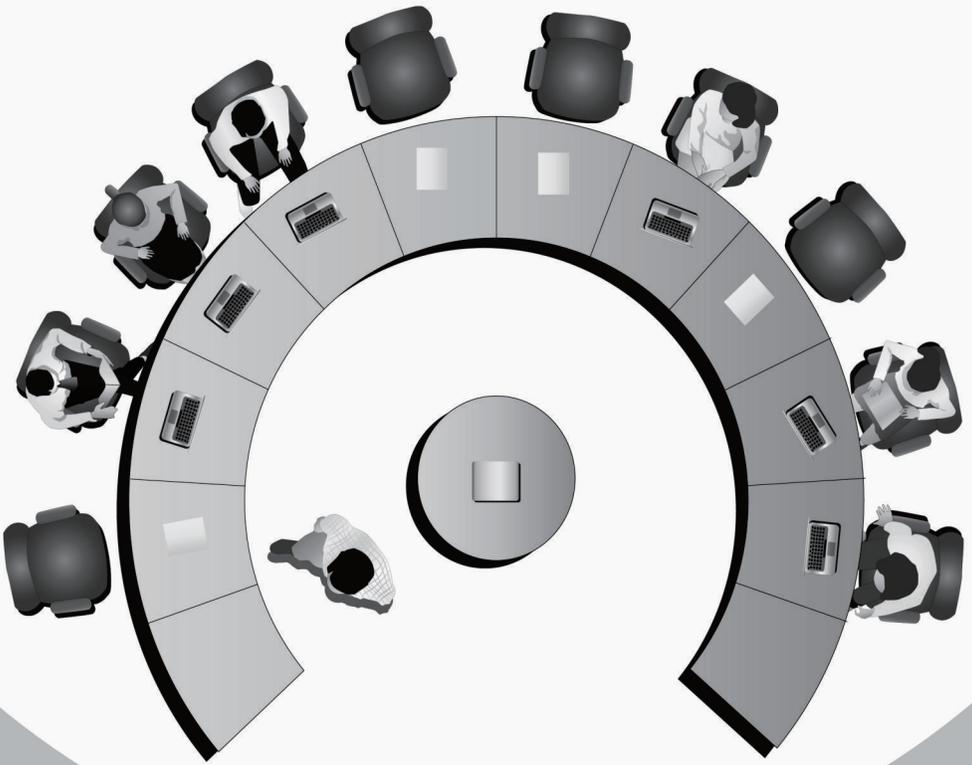
Isu politik dan sosial yang mungkin relevan untuk konteks Indonesia dewasa ini berdasarkan tren dan isu-isu yang umumnya penting dalam politik dan masyarakat Indonesia.

- a) Pemilihan Umum: Pemilihan umum adalah isu utama dalam konteks politik Indonesia. Pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif yang dilakukan secara berkala adalah saat penting dalam siklus politik Indonesia. Pemilihan umum legislatif terakhir diadakan pada April 2019, sementara pemilihan umum presiden dilaksanakan pada tahun 2019.
- b) Pandemi COVID-19: Seperti di negara lain, pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan di Indonesia. Ini mencakup tantangan dalam mengelola kesehatan masyarakat, ekonomi, dan distribusi

vaksin. Perubahan kebijakan dan tanggapan terhadap pandemi adalah isu penting dalam politik dan masyarakat Indonesia.

- c) **Ekonomi:** Perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi, selalu menjadi perhatian utama. Kebijakan ekonomi, termasuk infrastruktur dan investasi, memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
- d) **Isu Sosial:** Isu-isu sosial, seperti ketidaksetaraan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan, tetap menjadi perhatian di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat sipil sering kali terlibat dalam perdebatan tentang masalah ini.
- e) **Korupsi dan Transparansi:** Upaya untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan adalah isu penting dalam politik Indonesia. Badan-badan penegak hukum dan lembaga anti-korupsi berperan dalam upaya ini.
- f) **Keamanan Nasional:** Indonesia adalah negara dengan kompleksitas keamanan yang tinggi, termasuk isu-isu terkait dengan konflik di Papua, penanggulangan terorisme, dan upaya mempertahankan kedaulatan di perairan teritorial.
- g) **Perubahan Iklim:** Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim menjadi semakin penting.

- h) **Kontroversi Agama dan Identitas:** Indonesia memiliki beragam budaya dan agama. Isu-isu yang berkaitan dengan agama, identitas, dan hak minoritas sering kali menjadi subjek perdebatan dan ketegangan sosial.
- i) **Media Sosial dan Disinformasi:** Penggunaan media sosial telah berkembang pesat di Indonesia, dan masalah terkait dengan disinformasi dan hoaks menjadi isu penting dalam politik dan masyarakat. Situasi politik dan sosial selalu berkembang, dan isu-isu ini dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti berita dan sumber informasi yang dapat diandalkan untuk memahami dinamika terbaru dalam politik dan masyarakat Indonesia.



BAB 2

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM REVOLUSI INDUSTRI 5.0

Kepemimpinan transformasional diartikan sebagai kepemimpinan yang para pemimpin menggunakan karisma mereka untuk menciptakan transformasi dan membawa vitalitas baru ke dalam organisasi. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran dan strategi sentral dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan.

Pemimpin transformasional juga harus mampu menyelaraskan visi masa depan dengan bawahan dan meningkatkan tuntutan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari yang mereka perlukan. Berikut beberapa definisi dari kata kepemimpinan transformasional. Beberapa sumber buku:

Kepemimpinan transformasional adalah tentang membangun proses komitmen terhadap tujuan organisasi dan kepercayaan pada karyawan pengikutnya untuk mencapai tujuan tersebut. Teori kepemimpinan transformasional tentang bagaimana pemimpin mengubah budaya organisasi dan Mengatur struktur organisasi dan menerapkan strategi manajemen untuk mencapai sasaran organisasi. (Rohmat. 2020)

Menurut Bass dalam Yukl kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan dimana para pengikut dari seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada yang awalnya diharapkan mereka. Yukl, G. (2010).

Revolusi Industri 5.0 adalah perkembangan terbaru dalam sejarah revolusi industri yang telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup. Revolusi industri ini

menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things (IoT), komputasi awan, dan teknologi terkait untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas, terhubung, dan adaptif.

Society 5.0 adalah konsep di mana masyarakat kita harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Menurut Shinzo Abe di World Economic Forum, "Society 5.0 itu bukan cuma model. Tetapi data yang menghubungkan semuanya. Ia membantu gap antara yang kaya dan yang kurang. Dari kedokteran sampai pendidikan." Contohnya bagaimana cara memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan. Jadi, orang yang tadinya sulit mendapat akses kesehatan (entah karena jauh dari rumah sakit atau sulit secara finansial) bisa mendapat bantuan. (Abe, Shinzo. 2013.)

Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri ini pun sedang berjalan dari masa ke masa. Dekade terakhir ini sudah dapat disebut memasuki fase ke empat 4.0. Perubahan fase ke fase memberi perbedaan artikulatif pada sisi kegunaannya. Fase pertama (1.0) bertempuh pada penemuan mesin yang menitikberatkan (stressing) pada mekanisasi produksi. Fase kedua (2.0) sudah beranjak pada etape produksi massal yang terintegrasi dengan quality control dan standarisasi. Fase ketiga (3.0) memasuki tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi. Fase keempat (4.0) telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur.

2.1 Visi Strategis

Semua pemimpin hebat bertindak dengan visi yang jelas. Mereka Masih mungkin untuk memberikan jawaban pasti mengapa hal itu terjadi melakukan suatu tindakan. Dan untuk menciptakan visi yang jelas. Anthony Robbins menawarkan empat saran sederhana. Pertama, tulis satu atau dua paragraf tentang alasannya Anda bersemangat mengembangkan diri sendiri, organisasi Anda, dan tim teman. Kedua, pastikan visi Anda emosional dan inspiratif. memiliki kemampuan untuk memobilisasi Anda dan tim Anda untuk menyelesaikannya bekerja. Ketiga, pastikan visi Anda spesifik. Keempat, jangan lakukan perfeksionis.

2.2 Inspirasi dan Motivasi

Kepemimpinan transformasional memiliki karakteristik kharismatik, mendorong motivasi inspirasi, memberi stimulus intelektual dan perhatian pada karyawan terhadap individu (Bass Avolio, 1996), dengan faktor pendukung sebagai berikut ; (a) menunjukkan perilaku kharismatik yaitu rasa hormat untuk dipercaya, kepercayaan orang lain, rasa pengertian, standar moral yang tinggi, membangun tujuan yang menantang dan menjadi model bagi pengikutnya, (b) memunculkan motivasi inspirasional meliputi; memberikan inspirasi dengan menyampaikan visi dengan lancar, percaya diri, meningkatkan optimisme, semangat individu, kelompok dan antusias, (c) memberikan stimulus intelektual dengan cara mendorong menjadi, mendorong staf memberikan asumsi, membuat kerangka permasalahan, mendekati pengikut baru, (d) memberlakukan pengikutnya dengan memberikan perhatian dengan cara memberikan perhatian secara personal, individu

merasa dihargai, pengembangan tugas melalui pendelegasian (U. Khasanah, 2019).

Pandangan baru dalam untuk menciptakan kepemimpinan transformasional untuk menciptakan kepemimpinan secara sinergis ada lima cara (Erik Rees, 2001), yaitu (a) simplikasi yang diawali dengan sebuah visi bersama, (b) motivasi untuk mendapatkan komitmen setiap individu yang terlibat terhadap visi, (c) fasilitasi yaitu kemajuan secara efektif dalam pembelajaran individu dan kelompok untuk menambah modal intelektual, (d) inovasi yaitu berani dan bertanggung jawab dalam melakukan perubahan yang menjadi tuntutan lembaga (U. Khasanah, 2019). Tanggung jawab dan komitmen saling mendukung dalam kepemimpinan.

2.3 Keberanian Mengambil Resiko

Sebuah pilihan atau keputusan yang akan dilakukan oleh seorang wirausaha sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengambil risiko. Sedangkan kemampuan untuk mengambil risiko tersebut ditentukan oleh hal – hal sebagai berikut menurut (Suryana, 2013) : keyakinan pada diri sendiri, kesediaan menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, kemampuan menilai situasi risiko secara realistis.

Pengambilan risiko berkaitan dengan kepercayaan diri sendiri yang artinya semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan untuk memengaruhi hasil dan semakin besar pula kesediaan seseorang untuk mencoba apa yang menurut orang lain sebagai risiko, Meredith dalam (Suryana, 2013).

2.4 Penggunaan Teknologi Canggih

Penelitian yang dilakukan oleh Atmajaya dan Wirata bahwa manfaat penggunaan sistem informasi desa dapat dirasakan oleh pemerintah desa karena lebih efisien dan efektif, lebih transparan, akuntabel, layanan publik lebih baik dan kemudahan warga dalam mengakses informasi desa dan partisipasi aktif dari warga dalam pembangunan desa (Atmajaya & Wirata, 2021). Akan tetapi, jika SDM tidak mampu menguasai teknologi informasi maka akan berdampak pada lambatnya pelayanan publik kepada masyarakat (Fathony et al., 2021).

Organisasi memiliki kegiatan salah satunya adalah memberikan pelayanan baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Aktivitas pelayanan yang diberikan sangat berpengaruh pada pencapaian mutu dan kelancaran kegiatan organisasi hingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang baik tercermin dari setiap efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dengan lancar. Semakin cepat dan akurat maka kualitas pelayanan akan semakin baik (Mulyapradana, 2017).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Fakhriyah et al., 2022).

Kualitas pelayanan publik merupakan kemampuan organisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui

pelayanan teknis maupun administrasi (Along, 2020). Kualitas pelayanan merupakan titik sentral bagi perusahaan maupun instansi karena mempengaruhi kepuasan dari konsumen atau masyarakat, kepuasan akan muncul jika kualitas pelayanan yang diberikan dilakukan secara baik (Mulyapradana et al., 2020)

2.5 Kolaborasi Antar Departemen

Kolaborasi antar Kementerian di Indonesia sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini memerlukan koordinasi, komunikasi yang efektif, dan kerjasama yang baik di antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah. (Kolaborasi dalam pengembangan Infrastruktur; Pengembangan Ekonomi; Pengelolaan Lingkungan; Pendidikan dan Kesehatan; Keamanan Nasional; serta Pengentasan Kemiskinan)

Collaborative merupakan tanggapan atas pergeseran-pergeseran maupun perubahan-perubahan lingkungan kebijaksanaan. Perubahan-perubahan itu dapat terjadi dalam bentuk jumlah pelaku kebijaksanaan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas. Menurut Mutiarawati dan Sudarmo (2017) kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normative merupakan konsep kolaborasi. Serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional merupakan definisi kolaborasi dalam arti sempit. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintahan maupun institusi nonpemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi

kepentingan dan tujuannya.

Kolaborasi ini bisa terdiri dari institusi pemerintah saja, LSM lokal saja, swasta saja atau bisa juga mencakup institusi yang berafiliasi ke pemerintah lalu berkolaborasi dengan LSM-LSM setempat yang didanai oleh pihak pemerintah/swasta/ LSM/ penyandang dana dari luar negeri. Lebih lanjut, aspirasi atau tujuantujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan patner atau mitranya merupakan definisi kolaborasi dalam arti normative.

Konsep kolaborasi merupakan kerjasama yang melibatkan antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya, dan aktivitas. Dimana institusi pada dasarnya memiliki tujuan dan berusaha mewujudkannya (Fosler,2002). Lebih lanjut, menurut Balogh et.al (2011) Collaborative merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan maupun instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik.

Menurut Agustiani (2017) dalam kerjasama kolaboratif masing-masing diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak yang sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya suatu keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi public dengan mitranya dari organisasi di sector privat. Dalam kerjasama kolaboratif, visi bersama menjadi dasar bagi

masing-masing pihak untuk merumuskan tujuan, strategi, alokasi, sumberdaya, dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya visi bersama tersebut.

Kolaborasi merupakan upaya bersama dari lembaga pemerintah dan warga yang peduli, dengan menggunakan istilah pemangku kepentingan yang merujuk pada partisipasi warga sebagai individu dan partisipasi kelompok terorganisir.

2.6 Partisipasi Warga

Partisipasi warga negara adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya partisipasi ini dan terus mengembangkan mekanisme yang memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan dan pembangunan negara. (Pemilihan Umum; Proses Legislasi; Aktivisme Sosial dan Protes; Pembangunan Lokal; Penggunaan Media Sosial; serta Pengawasan dan Transparansi)

Sistem politik Indonesia sedang dalam proses demokratisasi. Masyarakat perlu mempunyai banyak sikap untuk menyikapi perkembangan demokrasi: Pertama, keterbukaan personal mengungkap kelemahan, terutama pada psikologi aparatur negara. Kedua, apresiasi terhadap sistem politik demokrasi Pancasila sebagai wujud sikap politik yang proporsional dan rasional. Ketiga, partisipasi politik sesuai dengan lembaga dan peraturan, khususnya partisipasi konstruktif dan wajar dalam membangun ketertiban, demokrasi, perdamaian, peradaban, dan kesejahteraan.

(Cholisin. 2009)

2.7 Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) adalah aspek yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui investasi dalam pendidikan dan pengembangan kompetensi individu, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi, dan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia adalah investasi jangka panjang yang krusial bagi kemajuan Indonesia. Dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. (Pendidikan Dasar dan Menengah; Pendidikan Tinggi; Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan; Penelitian dan Inovasi serta Kewirausahaan dan Kreativitas)

Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses mengembangkan sumber daya manusia ke keadaan yang lebih baik untuk menyiapkan tanggung jawab dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu: pelatihan di tempat kerja (*on the job training*) dan pelatihan di luar tempat kerja (*off the job training*). Pelatihan di tempat kerja dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: rotasi pekerjaan (*job rotation*), bimbingan dan penyuluhan (*coaching and counseling*), magang (*understudy*), demonstrasi dan pemberian contoh (*demonstration and example*).

Sedangkan pelatihan di luar tempat kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: simulasi (*simulation*), dan presentasi informasi (*information presentation*). Strategi yang dimaksud disini adalah berbagai cara yang dilakukan lembaga atau organisasi, khususnya pendidikan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat ini maupun pada saat yang akan datang. (Hartanto, Slamet B. 2015).

2.8 Kepemimpinan Berbasis Nilai

Kepemimpinan berbasis nilai adalah pendekatan dalam memimpin yang ditekankan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mendalam. Ini melibatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai inti seperti kejujuran, integritas, empati, keadilan, dan tanggung jawab. Kepemimpinan semacam ini bukan hanya tentang mencapai tujuan organisasi, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat secara lebih luas. Kepemimpinan berbasis nilai memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa dihormati, didukung, dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Selain itu, kepemimpinan berbasis nilai juga memberikan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan cara yang etis dan berkelanjutan. (Integritas dan Kejujuran; Keadilan dan Kesetaraan; Empati dan Kepedulian; Tanggungjawab dan Etika Kerja; Pendidikan dan Pengembangan; Inspirasi dan Motivasi; serta Pengambilan Keputusan Etis)

Kepemimpinan yang ideal untuk sebuah organisasi dan diharapkan menjadi literasi bagi mahasiswa dan masyarakat yang mencari bahan bacaan untuk sebuah pembahasan

mengenai kepemimpinan yang ideal bagi sebuah organisasi. Seorang pemimpin memiliki sifat, watak, serta kepribadian yang unik dan memiliki ciri khas, sehingga seorang pemimpin dapat membedakan dengan cara tingkah laku maupun gayanya dari orang lain. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasi, kekuatan moral, dan semangat yang kreatif dan seorang pemimpin mampu untuk mempengaruhi seluruh anggota dalam mengubah sikap yang searah dengan visi dan misi, dalam sebuah organisasi.

Pemimpin telah menjadi sosok yang teladan serta panutan bagi anggotanya. Dalam hal ini, terdapat beberapa tipe kepemimpinan secara umum adalah otokratik, kharismatik, demokratik, *laissez faire*, dan lain-lain. Hal tersebut memiliki fungsi dalam melakukan perbaikan mutu organisasi. Seorang pemimpin mampu memberikan motivasi bawahan melalui kearifan lokal Indonesia yakni gaya kepemimpinan berbasis karakter dalam mewujudkan diperlukan gaya manajemen kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan 18 nilai Karakter Pancasila ke dalam gaya kepemimpinan. (Verah.et.all (2023).

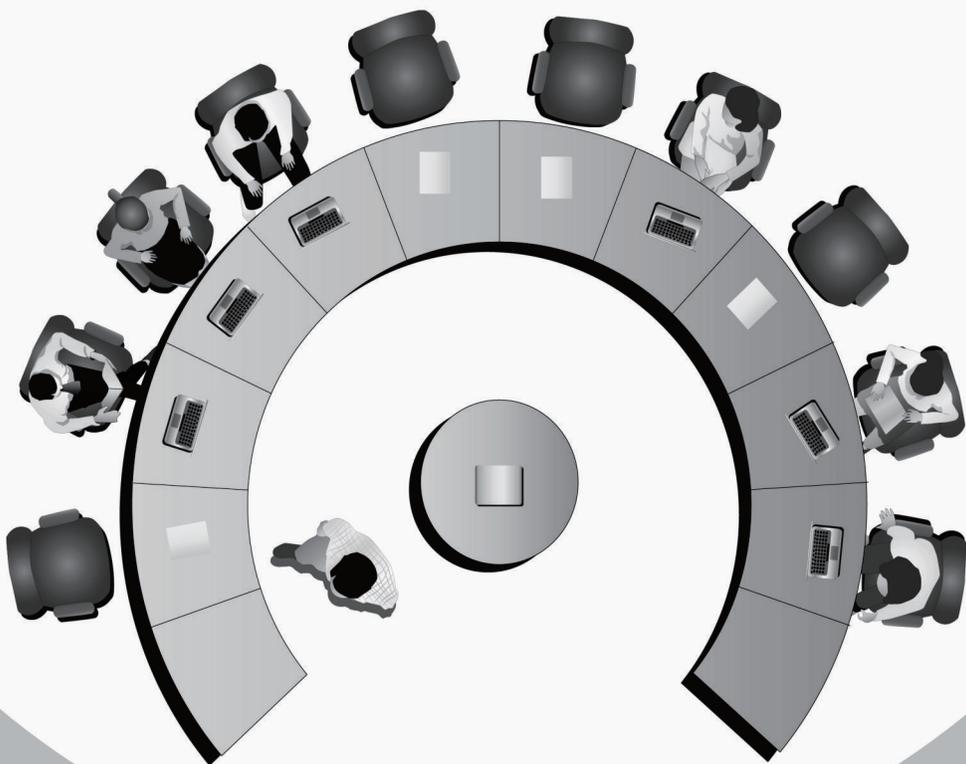
2.9 Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan

Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan merupakan dua komponen yang sangat penting dalam proses pengembangan organisasi, program, atau inisiatif apa pun. Keduanya saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan adalah alat yang kuat dalam mencapai perbaikan yang berkelanjutan, pertumbuhan, dan kesuksesan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga pemerintahan, organisasi nirlaba, dan pendidikan. Mereka membantu organisasi dan

individu untuk terus berkembang, beradaptasi, dan mencapai potensi mereka secara maksimal.

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan data, informasi, dan bukti yang relevan untuk menilai kinerja, efektivitas, dan dampak suatu program, proyek, atau kebijakan. Evaluasi membantu dalam menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai dan sejauh mana hasil yang diharapkan telah direalisasikan. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan dari suatu inisiatif. (Mengidentifikasi Kelemahan dan Kelebihan; Mengukur Dampak; Mendukung Pengambilan Keputusan; Mengukur Efisiensi dan Efektivitas).

Pembelajaran Berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan pentingnya belajar dari pengalaman dan kesalahan serta terus menerus meningkatkan praktik dan proses. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang telah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan, dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai. (Mengadaptasi dan Berkembang; Inovasi; Peningkatan Berkelanjutan; dan Pengembangan Kapasitas)



BAB 3

KEPEMIMPINAN

NASIONAL INDONESIA

3.1 Kepemimpinan Nasional Indonesia, Era Orde Lama, dan Baru dan Reformasi.

Perjalanan kepemimpinan nasional Indonesia dari masa awal hingga saat ini mencerminkan dinamika yang kompleks, perkembangan politik, dan perubahan sosial yang telah terjadi sepanjang sejarah negara ini. Berikut adalah gambaran umum tentang beberapa pemimpin nasional utama dan periode penting dalam sejarah kepemimpinan Indonesia:

a. Masa Kemerdekaan dan Awal Kemerdekaan (1945-1965):

Soekarno (1945-1967): Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama. Dia memimpin perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan memainkan peran penting dalam pergerakan Non-Blok dalam politik global.

b. Era Orde Lama (1966-1998):

Soeharto (1967-1998): Soeharto mengambil alih kepemimpinan setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia memerintah selama hampir tiga dekade dan memimpin periode yang dikenal sebagai "Orde Baru." Pemerintahan Soeharto ditandai oleh stabilitas politik tetapi juga oleh otoritarianisme dan korupsi.

c. Reformasi dan Demokrasi (1998-sekarang):

Abdurrahman Wahid (1999-2001): Juga dikenal sebagai Gus Dur, dia adalah presiden pertama yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum. Pemerintahannya ditandai oleh upaya memperkuat demokrasi.

Megawati Soekarnoputri (2001-2004): Sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, Megawati memimpin dalam periode transisi menuju demokrasi yang lebih stabil dan menghadapi beberapa tantangan ekonomi dan politik.

Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014): Juga dikenal sebagai SBY, dia adalah presiden pertama yang terpilih untuk dua periode. Pemerintahannya ditandai oleh stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peran Indonesia dalam diplomasi regional.

Joko Widodo (2014-sekarang): Jokowi, seperti yang biasa dipanggil, adalah presiden saat ini. Pemerintahannya menekankan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan sosial. Dia juga berfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Perjalanan kepemimpinan nasional Indonesia telah melibatkan berbagai pemimpin dengan latar belakang, gaya kepemimpinan, dan fokus yang berbeda. Negara ini telah mengalami transformasi besar-besaran sejak kemerdekaan, termasuk perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Meskipun ada berbagai tantangan dan perubahan dalam perjalanan ini, Indonesia telah berhasil mempertahankan stabilitas politik, tumbuh sebagai kekuatan ekonomi regional, dan memainkan peran penting dalam diplomasi internasional.

3.2 Profil, Latar Belakang, Dan Pengalaman Masing-Masing Pemimpin.

Berikut adalah profil singkat beberapa pemimpin nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah negara

tersebut:

1. Soekarno (1901-1970):

- a. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama negara ini.
- b. Dia memimpin perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan menjadi figur sentral dalam pergerakan nasional Indonesia.
- c. Soekarno dikenal dengan pidato-pidatonya yang berapi-api dan ideologi nasionalisme Indonesia, yang dikenal sebagai Pancasila.

2. Soeharto (1921-2008):

- a. Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang memerintah selama hampir tiga dekade dari tahun 1967 hingga 1998.
- b. Pemerintahan Soeharto dikenal sebagai "Orde Baru" dan ditandai oleh stabilitas politik, tetapi juga oleh otoritarianisme dan korupsi yang luas.

3. B.J. Habibie (1936-2019):

- a. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia, menjabat dari 1998 hingga 1999.
- b. Dia memimpin negara selama masa transisi dari Orde Baru ke era demokrasi Reformasi dan memfasilitasi pemilu bebas pertama di Indonesia.

4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1940-2009):

- a. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, adalah presiden pertama Indonesia yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum pada tahun 1999.

- b. Dia dikenal karena advokasi terhadap hak minoritas, pluralisme budaya, dan upaya memperkuat demokrasi.

5. Megawati Soekarnoputri (lahir tahun 1947):

- a. Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan pertama Indonesia yang menjabat dari 2001 hingga 2004.
- b. Dia adalah putri Soekarno dan memimpin dalam periode transisi menuju demokrasi yang lebih stabil.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (lahir tahun 1949):

- a. Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, adalah presiden pertama yang terpilih untuk dua periode, menjabat dari 2004 hingga 2014.
- b. Pemerintahannya ditandai oleh stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peran Indonesia dalam diplomasi regional.

7. Joko Widodo (Jokowi) (lahir tahun 1961):

- a. Joko Widodo, atau Jokowi, adalah presiden saat ini, menjabat sejak 2014.
- b. Dia adalah mantan walikota Solo dan gubernur Jakarta sebelum menjadi presiden.
- c. Pemerintahannya fokus pada pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pemberantasan korupsi.

Masing-masing dari pemimpin ini memiliki peran dan kontribusi unik dalam sejarah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia, serta dalam membentuk masa depan negara ini.

3.3 Perbedaan Dalam Gaya Kepemimpinan, Visi, Dan Agenda Kebijakan.

Berikut adalah gambaran umum tentang gaya kepemimpinan, visi, dan agenda kebijakan dari beberapa pemimpin nasional Indonesia yang telah disebutkan:

1. Soekarno (Presiden 1945-1967)

- a. Gaya Kepemimpinan: Soekarno dikenal dengan gaya kepemimpinan karismatik. Ia adalah orator ulung dan memiliki kekarismatikan yang besar di mata rakyat. Gaya kepemimpinannya penuh semangat dan revolusioner.
- b. Visi: Soekarno menganut ideologi nasionalisme Indonesia dan Pancasila. Visinya adalah menyatukan beragam etnis dan budaya di Indonesia dalam satu negara yang merdeka dan berdaulat.
- c. Agenda Kebijakan: Soekarno memegang keyakinan kuat dalam meraih kedaulatan ekonomi dan politik. Ia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda dan mempromosikan konsep "politik ekonomi berdikari."

2. Soeharto (Presiden 1967-1998)

- a. Gaya Kepemimpinan: Soeharto memiliki gaya kepemimpinan otoriter dan cenderung lebih tertutup. Ia dikenal dengan kemampuannya untuk mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi.
- b. Visi: Soeharto menganut konsep "Pancasila" sebagai ideologi negara dan menekankan

pembangunan ekonomi serta stabilitas politik sebagai prioritas utama.

- c. Agenda Kebijakan: Pemerintahan Soeharto menekankan pada pembangunan ekonomi dan investasi asing. Program-program seperti “Pembangunan Lima Tahun” menjadi ciri khas kebijakan ekonomi Orde Baru.

3. B.J. Habibie (Presiden 1998-1999)

- a. Gaya Kepemimpinan: Habibie adalah pemimpin yang lebih terbuka dan transparan. Dia mengambil alih setelah Reformasi dan berusaha memulai era demokratisasi.
- b. Visi: Visi Habibie adalah mengalihkan Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi, serta mengejar kesejahteraan rakyat.
- c. Agenda Kebijakan: Agenda kebijakan Habibie mencakup penyelenggaraan pemilu bebas pertama di Indonesia, pembebasan tahanan politik, dan upaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat.

4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Presiden 1999-2001)

- a. Gaya Kepemimpinan: Gus Dur adalah sosok yang eksentrik dan sangat inklusif dalam pendekatannya. Dia mempromosikan toleransi beragama dan kebebasan beragama.
- b. Visi: Visi Gus Dur adalah menciptakan Indonesia yang inklusif, demokratis, dan berdasarkan Pancasila, dengan penekanan pada hak asasi manusia dan pluralisme.

- c. Agenda Kebijakan: Agenda kebijakan Gus Dur mencakup pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan antaragama.

5. Megawati Soekarnoputri (Presiden 2001-2004)

- a. Gaya Kepemimpinan: Megawati adalah pemimpin yang tegas namun pragmatis. Dia sering mewakili semangat nasionalisme dan kepemimpinan perempuan.
- b. Visi: Visi Megawati adalah mempertahankan dan memperkuat demokrasi di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Agenda Kebijakan: Pemerintahan Megawati mencakup upaya untuk memperbaiki ekonomi, mengatasi separatisme di Papua, dan memperkuat perdamaian di Aceh.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Presiden 2004-2014)

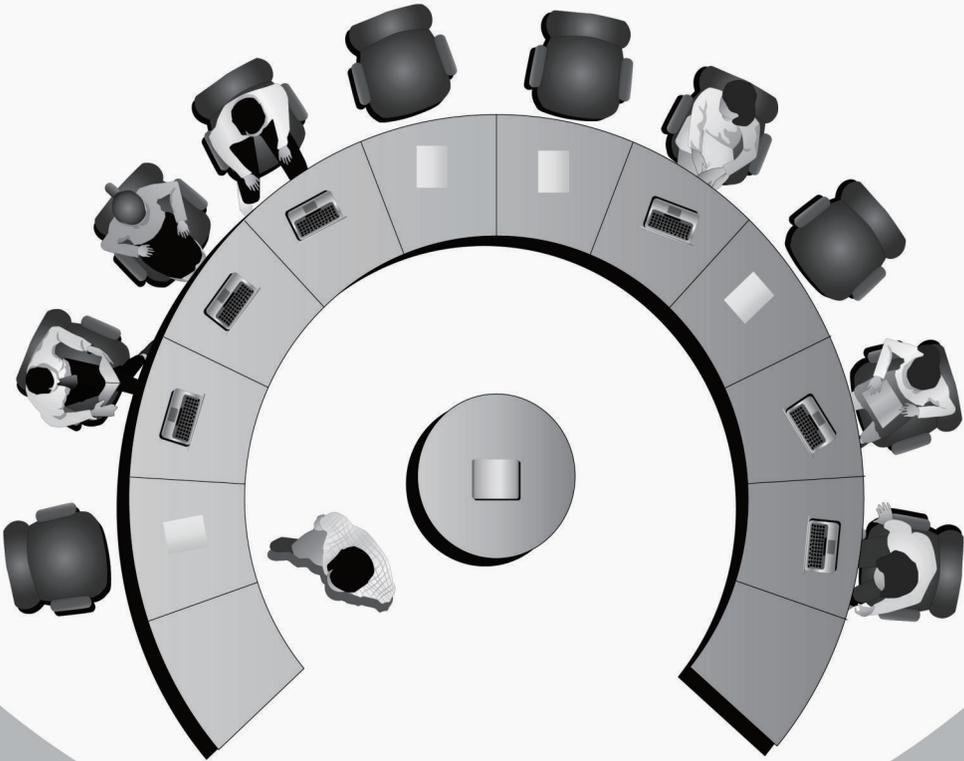
- a. Gaya Kepemimpinan: SBY adalah pemimpin yang tenang dan moderat. Dia dikenal dengan kepemimpinan yang pragmatis dan berorientasi pada solusi.
- b. Visi: Visi SBY adalah mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat peran Indonesia di dunia.
- c. Agenda Kebijakan: Agenda kebijakan SBY mencakup upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat pertahanan nasional, dan

mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

7. Joko Widodo (Jokowi) (Presiden 2014-sekarang)

- a. Gaya Kepemimpinan: Jokowi adalah pemimpin yang energik dan berorientasi pada aksi. Dia dikenal dekat dengan rakyat dan berfokus pada pembangunan infrastruktur.
- b. Visi: Visi Jokowi adalah membangun Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis masyarakat.
- c. Agenda Kebijakan: Agenda kebijakan Jokowi mencakup pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, pengurangan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi.

Setiap pemimpin nasional Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri dalam gaya kepemimpinan, visi, dan agenda kebijakan. Perubahan kepemimpinan ini mencerminkan evolusi Indonesia sebagai negara demokratis yang berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dan peluang.



BAB 4 KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN

4.1 Perubahan Kebijakan Dan Prioritas:

Berikut adalah gambaran singkat tentang beberapa kebijakan dan prioritas utama yang dikejar oleh kepemimpinan beberapa presiden Indonesia yang telah disebutkan:

a) Kepemimpinan Soekarno (Presiden 1945-1967)

Kebijakan Soekarno menerapkan kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda, mengambil alih sektor ekonomi dan sumber daya alam, dan mempromosikan "politik ekonomi berdikari" yang menekankan kemandirian ekonomi Indonesia. Prioritas: Soekarno memprioritaskan kedaulatan nasional, ketahanan ekonomi, dan persatuan nasional dalam berbagai kebijakan dan retorika politiknya.

b) Kepemimpinan Soeharto (Presiden 1967-1998)

Kebijakan Pemerintahan Soeharto dikenal dengan program "Pembangunan Lima Tahun" yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengundang investasi asing, dan mencapai stabilitas politik dan sosial. Prioritas: Prioritas utama Soeharto adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.

c) Kepemimpinan B.J. Habibie (Presiden 1998-1999)

Kebijakan Habibie memulai era reformasi dan meningkatkan kebebasan politik serta kebebasan berpendapat. Dia juga berusaha memulihkan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Prioritas: Prioritas Habibie termasuk demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan ekonomi setelah krisis finansial Asia.

d) Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Presiden 1999-2001):

Kebijakan: Pemerintahan Gus Dur mencakup upaya untuk memperkuat demokrasi, mempromosikan toleransi beragama, dan melanjutkan reformasi ekonomi. Prioritas: Prioritas utama Gus Dur adalah membangun masyarakat inklusif, melindungi hak minoritas, dan mengatasi konflik antaragama.

e) Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri (Presiden 2001-2004):

Kebijakan: Pemerintahan Megawati mencakup upaya untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga, memperkuat perdamaian di Aceh, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prioritas: Prioritas Megawati adalah menjaga stabilitas politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan perdamaian di wilayah konflik.

f) Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Presiden 2004-2014):

Kebijakan: Pemerintahan SBY mencakup upaya untuk mengatasi korupsi, memperkuat pertahanan nasional, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prioritas: Prioritas SBY adalah mempertahankan stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan, dan memainkan peran aktif dalam diplomasi regional.

g) Joko Widodo (Jokowi) (Presiden 2014-sekarang):

Kebijakan: Pemerintahan Jokowi mencakup pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi

birokrasi, pengurangan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi.

Prioritas: Prioritas Jokowi adalah meningkatkan kualitas hidup rakyat, memajukan perekonomian Indonesia, dan meningkatkan daya saing negara ini di tingkat internasional.

Setiap pemimpin memiliki kebijakan dan prioritas uniknya sendiri, yang mencerminkan kondisi dan tuntutan saat itu. Perubahan kepemimpinan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia mencerminkan berbagai perubahan dalam prioritas nasional dan fokus kebijakan negara.

4.2 Prioritas Nasional Yang Terjadi Setelah Pergantian Kepemimpinan.

Pergantian kepemimpinan di Indonesia, dari Soekarno hingga Jokowi, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam kebijakan dan prioritas nasional. Berikut adalah beberapa perubahan utama yang terjadi setelah pergantian kepemimpinan:

1. Dari Soekarno ke Soeharto (1967):

- a) Perubahan dalam Kebijakan Ekonomi: Soeharto menggantikan kebijakan ekonomi berdikari Soekarno dengan program ekonomi yang lebih terbuka dan orientasi pasar. Ini menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.
- b) Pengurangan Pengaruh Politik Militer: Pergantian kepemimpinan menandai penurunan pengaruh politik militer dalam pemerintahan Indonesia, meskipun militer tetap memiliki peran penting

dalam era Soeharto.

2. Dari Soeharto ke Habibie (1998):

- a) Pemulihan Kebebasan Politik: Pemerintahan Habibie menghadirkan era reformasi yang mencakup pemulihan kebebasan politik, termasuk kebebasan pers dan berorganisasi.
- b) Peningkatan Hubungan Internasional: Habibie berusaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan dunia internasional setelah kontroversi penumpahan darah di Timor Timur dan isolasi internasional di masa Soeharto.

3. Dari Habibie ke Gus Dur (1999):

- a) Demokratisasi yang Lebih Lanjut: Pemerintahan Gus Dur memperkuat demokrasi Indonesia dengan mengadakan pemilihan umum pertama secara bebas dan adil.
- b) Pengakuan Hak Asasi Manusia: Gus Dur mengambil langkah-langkah untuk mengakui pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk insiden kekerasan politik.

4. Dari Gus Dur ke Megawati (2001):

- a) Pemulihan Stabilitas: Megawati Soekarnoputri berfokus pada memulihkan stabilitas politik dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga.
- b) Perdamaian di Aceh: Pemerintahan Megawati berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh.

5. Dari Megawati ke SBY (2004):

- a) Pemberantasan Korupsi: SBY memprioritaskan pemberantasan korupsi dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melawan korupsi.
- b) Stabilitas Ekonomi: SBY mengambil tindakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengatasi krisis finansial global.

6. Dari SBY ke Jokowi (2014):

- a) Pembangunan Infrastruktur: Jokowi telah mengambil langkah-langkah besar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk proyek-proyek seperti jaringan jalan tol, bandara, dan pelabuhan.
- b) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Jokowi memprioritaskan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program-program seperti Kartu Prakerja dan dana desa.

Perubahan kepemimpinan ini mencerminkan respons terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia sepanjang sejarahnya, termasuk perubahan dalam dinamika ekonomi global, tekanan dari masyarakat sipil, dan perkembangan sosial dan politik. Kebijakan dan prioritas nasional berubah sesuai dengan kebutuhan dan visi pemimpin serta aspirasi rakyat.

4.3 Perubahan Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Kebijakan Luar Negeri

Berikut adalah contoh perubahan dalam ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kebijakan luar negeri dari masa

pemerintahan Soekarno hingga Jokowi:

a. Ekonomi:

- a) Soekarno (1945-1967): Pada masa Soekarno, pemerintah menerapkan ekonomi tertutup dengan banyak perusahaan negara, yang dikenal sebagai "ekonomi berdasarkan konsep sosialisme." Hal ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang cukup besar.
- b) Soeharto (1967-1998): Pemerintahan Soeharto menandai era liberalisasi ekonomi, dikenal sebagai Orde Baru. Pemerintah menggalakkan investasi asing, privatisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga dituding korupsi dan ketidaksetaraan ekonomi.
- c) Habibie (1998-1999): Pemerintahan Habibie menyaksikan upaya pemulihan ekonomi setelah krisis moneter Asia. Masa ini menandai langkah-langkah untuk memperbaiki iklim investasi dan melembagakan reformasi ekonomi.
- d) Gus Dur (1999-2001): Pemerintahan Gus Dur menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk kebijakan fiskal yang berhati-hati dan reformasi sektor keuangan.
- e) Megawati (2001-2004): Pemerintahan Megawati fokus pada penguatan ekonomi nasional, dengan penekanan pada sektor pertanian dan kebijakan pertanian.

- f) SBY (2004-2014): Pemerintahan SBY berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi.
- g) Jokowi (2014-sekarang): Jokowi menggulirkan program pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti tol dan proyek kereta api cepat, serta berfokus pada pengembangan sektor manufaktur dan penciptaan lapangan kerja.

b. Pendidikan:

- a) Soekarno: Masa ini ditandai dengan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, dengan pembentukan sistem pendidikan yang lebih inklusif.
- b) Soeharto: Era Soeharto melihat peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga berdampak pada sentralisasi kontrol pendidikan.
- c) Habibie: Pemerintahan Habibie mencoba untuk melepaskan kontrol yang lebih besar dari pemerintah pusat ke daerah dalam hal pendidikan.
- d) Gus Dur: Pemerintahan Gus Dur mengedepankan prinsip kebebasan berpendapat dan beragama dalam sistem pendidikan.
- e) Megawati: Masa pemerintahan Megawati berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

- f) SBY: Era SBY menyaksikan peningkatan investasi dalam pendidikan tinggi dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.
- g) Jokowi: Pemerintahan Jokowi mendorong pembaharuan kurikulum pendidikan dan peningkatan akses pendidikan dasar.

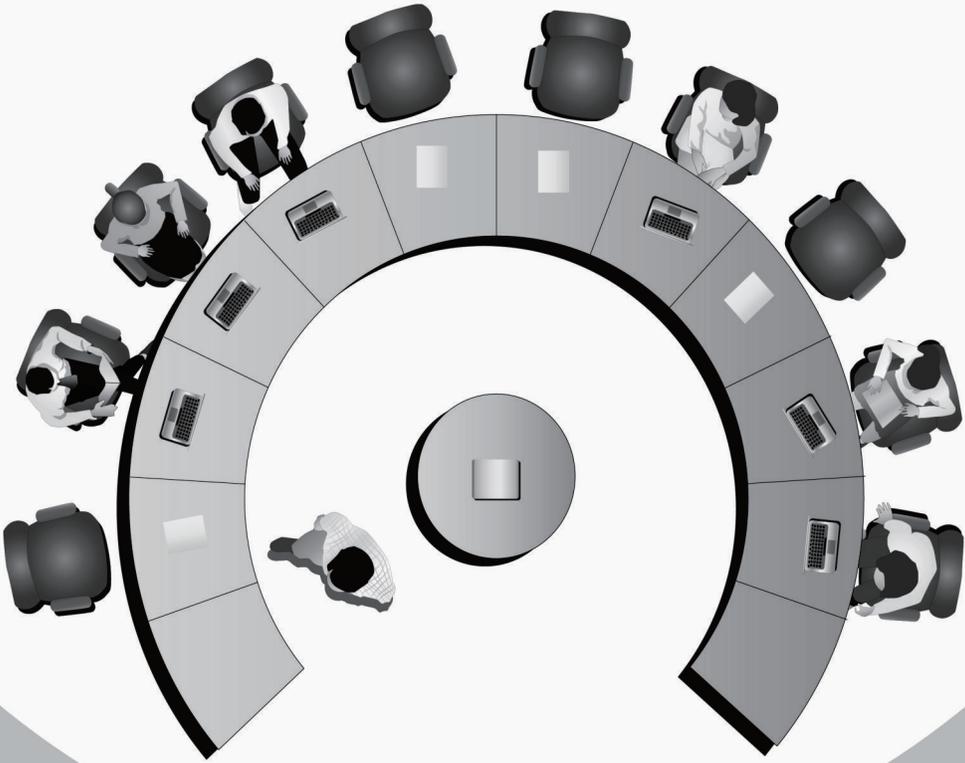
c. Lingkungan:

- a) Soekarno: Masa Soekarno mencakup industrialisasi cepat yang memengaruhi lingkungan, terutama di sektor pertambangan.
- b) Soeharto: Pemerintahan Soeharto terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang sering kali merugikan lingkungan.
- c) Habibie: Habibie menciptakan Kementerian Lingkungan Hidup pertama di Indonesia dan menggalakkan kesadaran lingkungan.
- d) Gus Dur: Pemerintahan Gus Dur menekankan kebijakan pelestarian lingkungan dan penanganan bencana alam.
- e) Megawati: Pemerintahan Megawati memiliki fokus pada pelestarian alam dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- f) SBY: SBY berkomitmen untuk melawan perubahan iklim dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- g) Jokowi: Jokowi mengedepankan upaya pelestarian lingkungan, terutama melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan upaya mengurangi sampah plastik.

d. Kebijakan Luar Negeri:

- a) Soekarno: Soekarno mendorong politik netralitas dan mendukung gerakan dekolonisasi di dunia ketiga.
- b) Soeharto: Pemerintahan Soeharto lebih mendekatkan diri dengan negara-negara Barat dan berfokus pada stabilitas regional.
- c) Habibie: Habibie mengalihkan perhatian pada kerja sama regional dan hubungan ekonomi internasional.
- d) Gus Dur: Gus Dur mendorong diplomasi dan hubungan bilateral yang lebih inklusif.
- e) Megawati: Pemerintahan Megawati melanjutkan upaya diplomasi dan mengedepankan hubungan dengan negara-negara Asia.
- f) SBY: Era SBY ditandai dengan kerja sama regional yang kuat, terutama dengan ASEAN dan negara-negara tetangga.
- g) Jokowi: Pemerintahan Jokowi berfokus pada diversifikasi hubungan luar negeri dan memperkuat diplomasi ekonomi.

Setiap periode kepemimpinan memiliki karakteristik dan prioritasnya sendiri dalam berbagai bidang ini, dan evolusi kebijakan terus berlanjut seiring perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.



BAB 5
DAMPAK PADA
MASYARAKAT DAN
EKONOMI

5.1 Perubahan Kepemimpinan Mempengaruhi Masyarakat.

Perubahan kepemimpinan dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat secara umum. Dampak ini bisa bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana kepemimpinan baru tersebut beroperasi dan apa visi serta kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan. Berikut adalah beberapa cara di mana perubahan kepemimpinan dapat mempengaruhi masyarakat:

Perubahan Kebijakan: Pemimpin baru seringkali membawa perubahan dalam kebijakan pemerintah. Ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan. Kebijakan-kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas hidup atau menyebabkan ketidakstabilan, tergantung pada pendekatan dan tujuan pemimpin. **Pergeseran Prioritas:** Pemimpin baru dapat mengubah prioritas negara atau pemerintahan. Misalnya, pemimpin baru mungkin lebih fokus pada pembangunan infrastruktur daripada pendidikan atau kesehatan, atau sebaliknya. Hal ini dapat memengaruhi masyarakat dengan cara mengubah alokasi sumber daya dan perhatian pemerintah.

Perubahan Sosial dan Budaya: Pemimpin juga dapat memengaruhi perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Mereka bisa mempromosikan toleransi, inklusi, atau sebaliknya, memperkuat polarisasi dan ketidaksetaraan di masyarakat. **Dampak Ekonomi:** Kepemimpinan yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk atau tidak stabil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan

ketidakpastian yang merugikan masyarakat.

Kepuasan Masyarakat: Perubahan kepemimpinan juga bisa mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Pemimpin yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat cenderung mendapatkan dukungan dan kepuasan yang lebih tinggi dari warganya. **Hubungan Luar Negeri:** Pemimpin baru dapat memengaruhi hubungan luar negeri dan diplomasi negara. Ini bisa berdampak pada perdagangan, hubungan politik, dan stabilitas regional, yang pada gilirannya mempengaruhi masyarakat.

Perubahan Hukum dan Keadilan: Kepemimpinan baru dapat mempengaruhi sistem hukum dan keadilan. Ini dapat mengubah cara penegakan hukum beroperasi, hak asasi manusia, dan akses masyarakat terhadap keadilan. **Partisipasi Politik:** Perubahan kepemimpinan juga dapat memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Kepemimpinan yang inspiratif dapat mendorong partisipasi aktif, sementara kepemimpinan yang otoriter dapat menghambatnya.

Kepemimpinan dalam Krisis: Kepemimpinan selama situasi darurat atau krisis besar juga memiliki dampak besar pada masyarakat. Cara pemimpin menangani krisis dapat mempengaruhi tingkat kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapinya.

Dengan kata lain, perubahan kepemimpinan adalah fenomena yang sangat relevan dalam politik dan masyarakat. Dampaknya tergantung pada berbagai faktor, termasuk karakter kepemimpinan, visi, dan pendekatan yang diambil oleh pemimpin baru. Masyarakat juga memiliki peran dalam membentuk arah yang diambil oleh kepemimpinan dengan partisipasi mereka dalam proses politik dan tuntutan mereka

kepada pemimpin.

Kepemimpinan berdasarkan perilaku atau gaya kepemimpinan transformasi (transformasi kepemimpinan) dan kepemimpinan melayani (kepemimpinan yang melayani) dianggap responsif tantangan era globalisasi. Dengan kepemimpinan transformasional, Pemimpin dapat mempengaruhi dan memobilisasi bawahan mengubah lingkungan kerja, mempunyai semangat dan motivasi, Memiliki kebiasaan dan nilai kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Mirip dengan kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan mampu mempengaruhi dan memobilisasi bawahan selalu bertanggung jawab hebat dalam tugas dan tanggung jawabnya.

Jawabannya diberikan dedikasi, loyalitas dan integritas baik dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan keberagaman perubahan dan tantangan Hadapilah dengan penuh tanggung jawab respons, termasuk tantangan seperti dampak globalisasi.

Globalisasi memberikan dampak yang cukup luas terhadap perubahan tatanan berbagai aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan lain-lain.

Pemimpin dituntut memiliki perilaku atau gaya kepemimpinan yang tepat yang mampu menghadapi perubahan-perubahan dan menjawab tantangan sebagai dampak dari globalisasi. Kepemimpinan transformational leadership dipandang mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan-perubahan dengan perilaku kepemimpinan, seperti: pengaruh ideal (*idealized influence*), motivasi inspirasional (*inspirational motivation*), stimulasi

intelektual (*intellectual stimulation*), dan konsiderasi individual (*individualized consideration*) dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemudian kepemimpinan *servant leadership* di sisi lain menumbuhkan sikap bawahan agar memiliki komitmen atau tanggung jawab dengan karakteristik pemimpin sebagai pelayan atau mengabdikan, seperti:

Humanity, relational power, autonomy, moral development of followers, emulation of leader's service orientation, listening, empathy, healing, awareness, persuasion, conceptualization, foresight, stewardship, commitment to the growth of people, community building, dan calling.

5.2 Perubahan Kebijakan Pada Sektor Ekonomi Dan Peluang Investasi.

Dampak krisis terhadap rumah tangga dan bisnis, pemerintah memberlakukan respon kebijakan yang cepat dan menyeluruh menggunakan kombinasi kebijakan sektor fiskal dan moneter. Banyak negara memberlakukan respon darurat secara masif terhadap gelombang pertama pandemi, penerapan respon kebijakan secara tegas dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mengurangi dampak langsung yang terburuk dari krisis.

Ketika dampak ekonomi dari pandemi berlanjut, pembuat kebijakan memiliki peran vital dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan dukungan yang cukup dalam mengurangi krisis tapi di sisi lain juga membatasi risiko keuangan dan makroekonomi jangka panjang yang dapat muncul dari tingkat utang yang lebih tinggi akibat krisis. Risiko-risiko tersebut kemungkinan besar muncul lebih cepat

di negara-negara berkembang dan terutama di negaranegara berpenghasilan rendah dikarenakan daya dukung utang publik dan swasta jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju dan kondisi ekonomi negara berkembang yang lebih menantang bahkan sebelum pandemi.

Dampak ekonomi dari pandemi akan lebih persisten dan lebih parah bagi negara berkembang. Setelah jatuhnya pendapatan per kapita di seluruh dunia pada tahun 2020, sekitar 40 persen negara maju pulih dan melampaui tingkat output pada tahun 2021 (IMF, 2021). Untuk mencapai "pemulihan yang adil" yang mencangkup masyarakat miskin, perempuan, dan usaha kecil untuk dapat pulih dari kehilangan pekerjaan, pendapatan, modal manusia, dan aset diperlukan penerapan kebijakan yang tepat. COVID-19 telah memperluas ketidaksetaraan di seluruh dunia.

Ekonomi hijau menjadi model yang mendorong pertumbuhan, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja yang berupaya mengubah interaksi antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan terutama jika kekayaan diukur dengan mempertimbangkan aset alam dan bukan hanya produktivitas. Ekonomi hijau berkontribusi secara substansial dalam mengurangi ketimpangan sosial antar negara dan mengentaskan kemiskinan di dunia.

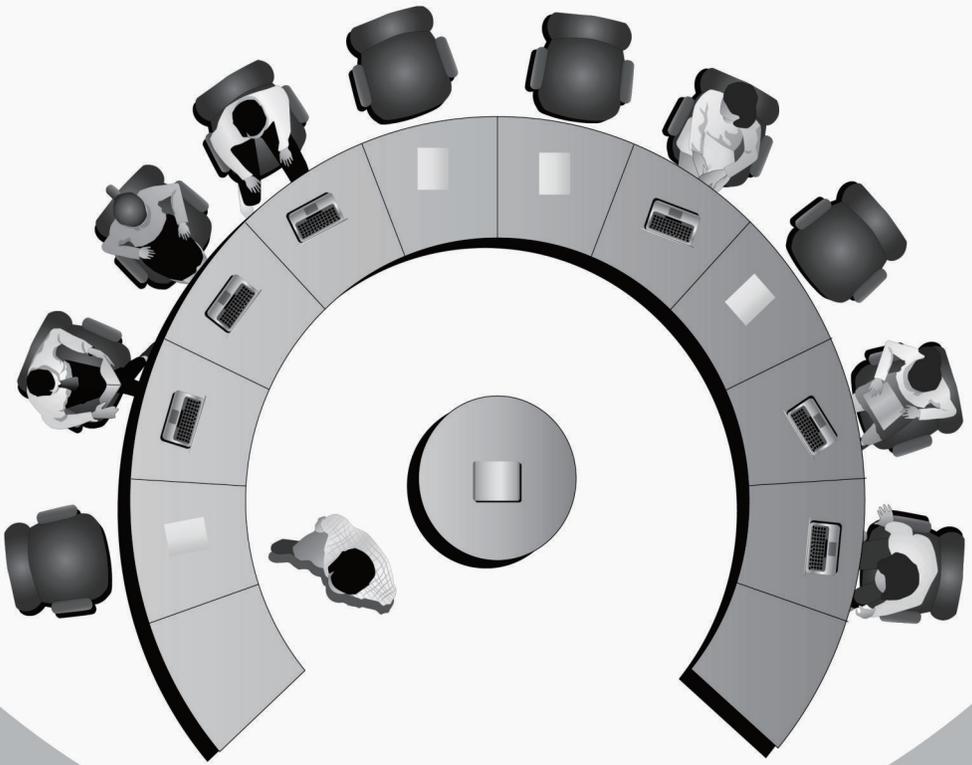
Implementasi ekonomi hijau dapat mencapai perubahan teknologi yang memungkinkan penerapan strategi lingkungan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan limbah dari aktivitasnya dapat dimasukkan kembali ke dalam proses produksi sehingga mengurangi penyebab polusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus diterapkan alternatif kebijakan ekonomi hijau yang dikembangkan melalui alokasi

sumber daya ekonomi, peraturan lingkungan yang lebih ketat, penciptaan subsidi, hingga kegiatan ramah lingkungan dan optimalisasi proses perencanaan wilayah.

Perlu adanya pembentukan kerangka kerja ekonomi baru yang memungkinkan untuk diterapkan tanpa mengabaikan premis fundamental pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dengan melibatkan sektor-sektor sosial yang rentan untuk mencapai pembangunan ekonomi dalam parameter keberlanjutan yaitu pemeliharaan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang layak. Prinsip-prinsip pengembangan ekonomi hijau didasarkan pada penyelarasan langkah-langkah pemulihan ekonomi dengan pencapaian tujuan mitigasi dan keberlanjutan perubahan iklim jangka menengah serta panjang. Energi terbarukan merupakan sektor kunci dalam dekarbonisasi ekonomi dan mencapai tujuan iklim.

Dalam konteks ini terdapat kekuatan tertentu dari skenario kebijakan publik untuk mendorong pemulihan hijau. Pengambilan kebijakan sangat ditentukan negara untuk memperkuat kebijakan yang pro-alam dengan menentukan target hasil yang berorientasi pada modal alam, memastikan ketersediaan dana yang konsisten untuk menjalankan kebijakan dan penentuan kebijakan. Tata kelola yang baik sangat penting untuk ini. Selain itu, pemerintah perlu bekerja untuk meminimalkan kesenjangan kebijakan seperti kebijakan atau program dengan dampak modal alam yang merugikan, mengatasi ketiadaan peraturan lingkungan yang vital, mempertimbangkan target pemulihan jangka panjang dan mengatasi kebijakan, data, dan penilaian yang hilang.

Pelajaran global dari pemulihan hijau, target dan komitmen global, serta kerja sama global, regional, dan nasional antara pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah dan panjang akan terdapat keuntungan dalam menerapkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau pada dasarnya dapat menjadi alat menangani ekonomi hingga masalah multilateral. Penerapan kebijakan yang tepat disertai dengan pemantauan dan keterlibatan berbagai pihak sangat memungkinkan fungsi ekonomi hijau akan tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi negara dan internasional.



BAB 6

KEPEMIMPINAN PEMERINATAHAN

6.1 Hubungan Internasional dan Diplomasi

Kerja sama Selatan-Selatan berperan penting dalam mendorong pembangunan melalui program strategis, seperti pelatihan, pemberian hibah, dan pemberdayaan perempuan. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi diplomasi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai new emerging donor guna mencapai kepentingan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Pengembangan kerja sama Selatan-Selatan Indonesia dapat dijelaskan dengan perspektif liberalisme, khususnya konsep diplomasi ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kerja sama Selatan-Selatan memberikan manfaat sebagai jembatan antara kebutuhan penerima manfaat dan kepentingan Indonesia, meningkatkan citra positif Indonesia, dan menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pasca pandemi Covid-19, kerja sama Selatan-Selatan juga menjadi salah satu bentuk kerja sama pembangunan dan salah satu instrumen untuk pemulihan kondisi serta building back better dalam pencapaian tujuan SDGs 2030.

Kerja sama Selatan-Selatan merupakan salah satu prioritas nasional pada RPJMN 2020- 2024. Manfaat kerja sama Selatan-Selatan bagi Indonesia antara lain: (a) sebagai jembatan antara kebutuhan penerima manfaat dan kepentingan Indonesia; (b) upaya meningkatkan citra positif Indonesia di kawasan dan global; (c) implementasi diplomasi ekonomi Indonesia. Pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan tidak dapat dilepaskan dari kiprah diplomasi Indonesia melalui Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Kerja

sama Selatan-Selatan bertujuan saling berbagi pengetahuan, keterampilan, expertise, dan sumber daya untuk menggapai agenda pembangunan dan mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh prinsip-prinsip solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Tanggapan publik terhadap kepemimpinan para pemimpin Indonesia yang telah disebutkan sangat beragam dan bisa sangat subjektif. Berikut adalah gambaran umum tentang tanggapan publik terhadap mereka:

Soekarno dianggap sebagai proklamator kemerdekaan dan bapak pendiri negara Indonesia. Banyak yang menghormatinya sebagai pahlawan nasional dan pemimpin revolusioner. Meskipun banyak yang mengagumi Soekarno, ada juga kritik terhadap gaya pemerintahannya yang otoriter dan sentralistik, serta kebijakan ekonomi yang kontroversial.

Soeharto memerintah dengan tangan besi selama hampir tiga dekade dan dikenal karena stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, masa pemerintahan Soeharto juga dicatat oleh pelanggaran hak asasi manusia, otoritarianisme, dan korupsi yang merajalela. Banyak yang merasa terbatas dalam kebebasan berbicara di bawah pemerintahannya.

Habibie mendapat penghargaan atas langkah-langkahnya menuju demokrasi dan kebebasan politik selama masa pemerintahannya yang singkat. Beberapa orang menghormati upayanya dalam memperbaiki hubungan internasional, tetapi ada juga kritik terkait dengan ketidakpuasan masyarakat atas kondisi ekonomi yang belum membaik.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Gus Dur dianggap sebagai tokoh yang mendukung hak asasi manusia dan kebebasan

beragama. Dia adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan umum. Meskipun banyak yang menghormatinya karena pendekatannya yang inklusif dan demokratis, pemerintahannya juga dicatat oleh ketidakstabilan politik dan masalah korupsi di sekitarnya.

Megawati adalah presiden perempuan pertama Indonesia. Dia mendapat dukungan dari banyak orang yang melihatnya sebagai lambang nasionalisme. Namun, beberapa orang merasa pemerintahannya tidak berhasil mengatasi masalah ekonomi dan ketidakstabilan politik di Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): SBY dianggap sebagai pemimpin moderat dan stabil yang berhasil mempertahankan demokrasi dan stabilitas politik. Kritik terhadap pemerintahannya terutama berkaitan dengan peningkatan ketidakesetaraan sosial dan masalah korupsi yang masih ada.

Joko Widodo (Jokowi): Jokowi mendapat dukungan luas dari rakyat Indonesia karena gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, fokus pada pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Meskipun banyak yang menghormatinya, ada juga kritik terkait dengan beberapa kebijakan, termasuk isu hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

Tanggapan publik terhadap kepemimpinan seseorang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dan pandangan pribadi mereka, sehingga pendapat dapat sangat bervariasi. Selain itu, pemimpin sering dinilai berdasarkan bagaimana mereka menghadapi tantangan dan masalah yang dihadapi negara selama masa pemerintahan mereka.

6.2 Respon Pergantian Pemimpin.

Merespons pergantian pemimpin, berbagai kelompok dan lapisan masyarakat di Indonesia mengeluarkan tanggapan yang beragam berdasarkan pandangan, kepentingan, dan pengalaman masing-masing. Berikut adalah gambaran umum tentang cara berbagai kelompok merespons pergantian pemimpin selama beberapa periode kepemimpinan:

a. Soekarno ke Soeharto:

Masyarakat Umum: Pergantian dari Soekarno ke Soeharto diikuti dengan harapan akan stabilitas politik dan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketidakpuasan terhadap pemerintah Soeharto karena otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemuda dan Aktivistis Mahasiswa: Pergantian ini memicu perlawanan dari pemuda dan aktivis mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan perubahan sosial.

b. Soeharto ke Habibie:

Aktivistis Reformasi: Pergantian dari Soeharto ke Habibie disambut positif oleh aktivis reformasi yang mendesak agar Indonesia lebih demokratis dan terbuka. Kelas Menengah: Kelas menengah merespons positif karena melihat Habibie sebagai pemimpin yang lebih toleran dan mendukung demokrasi.

c. Habibie ke Gus Dur:

Aktivistis Reformasi: Gus Dur dipandang sebagai pemimpin yang mendukung reformasi dan hak asasi manusia. Aktivistis reformasi memberikan dukungan besar kepadanya. Agama: Kelompok agama mengharapkan Gus Dur untuk mempromosikan toleransi beragama dan melindungi hak-hak agama minoritas.

d. Gus Dur ke Megawati:

Pendukung Megawati: Pendukung Megawati, terutama di kalangan etnis Jawa dan partai PDIP, merespons positif karena melihatnya sebagai simbol nasionalisme dan kesejahteraan rakyat.

Kritik dari Aktivistis: Aktivistis reformasi terkadang mengkritik pemerintahan Megawati karena dianggap kurang progresif dalam mendukung reformasi politik.

e. Megawati ke SBY:

Pengusaha dan Kelas Menengah: SBY mendapat dukungan dari pengusaha dan kelas menengah karena dianggap dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan investasi asing.

Aktivistis Hak Asasi Manusia: Aktivistis hak asasi manusia dan beberapa kelompok masyarakat mengkritik pemerintahan SBY karena terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia.

f. SBY ke Jokowi:

Masyarakat Umum: Jokowi mendapat dukungan besar dari masyarakat umum karena dirasakan dekat dengan rakyat, fokus pada pembangunan infrastruktur, dan upaya pemberantasan korupsi.

Kelompok Petani dan Pekerja: Jokowi mendapat dukungan dari kelompok petani dan pekerja karena kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi mereka.

Penting untuk diingat bahwa tanggapan dan dukungan masyarakat terhadap pemimpin selalu beragam dan berubah seiring berjalannya waktu dan kondisi sosial-politik yang berkembang. Faktor-faktor

seperti kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi, dan isu-isu politik tertentu dapat mempengaruhi cara berbagai kelompok dan lapisan masyarakat merespons kepemimpinan yang berubah.

6.3 Dampak Jangka Panjang Dari Perubahan Kepemimpinan.

Perubahan kepemimpinan dalam jangka panjang memiliki potensi dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya sebuah negara. Berikut adalah beberapa potensi dampak jangka panjang dari perubahan kepemimpinan di Indonesia:

1. Stabilitas Politik dan Keamanan

Perubahan kepemimpinan yang berjalan lancar dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan keamanan jangka panjang, menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pembangunan Ekonomi

Kepemimpinan yang efektif dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang baik dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja.

3. Kesejahteraan Sosial

Kepemimpinan yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat dapat berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

4. Hubungan Internasional

Kepemimpinan luar negeri yang kuat dapat memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi regional

dan global. Ini dapat membawa manfaat jangka panjang dalam hal perdagangan, kerja sama, dan dukungan internasional.

5. Reformasi Politik

Perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi proses reformasi politik jangka panjang, termasuk perubahan dalam konstitusi, peraturan pemilihan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

6. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Kepemimpinan yang mendukung hak asasi manusia dan demokrasi dapat membawa perubahan positif dalam perlindungan hak-hak individu dan kualitas demokrasi di negara tersebut.

7. Identitas dan Budaya Nasional

Kepemimpinan juga dapat memengaruhi identitas dan budaya nasional. Pemimpin yang mempromosikan budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional dapat memperkuat identitas nasional jangka panjang.

8. Lingkungan dan Keberlanjutan

Kepemimpinan yang peduli terhadap lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam dan upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Dampak jangka panjang dari perubahan kepemimpinan juga tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan yang diimplementasikan, situasi eksternal, dinamika politik internal, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk memiliki visi yang jelas dan kebijakan yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan rakyatnya.

6.4 Pemimpin Baru Dan Tantangan Mendatang.

Harapan terhadap pemimpin baru di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada pandangan individu dan kelompok masyarakat. Namun, secara umum, ada beberapa hal yang sering diharapkan dari seorang pemimpin baru, dan ada juga beberapa strategi yang dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan mendatang:

a. Harapan Terhadap Pemimpin Baru:

- 1) Kepemimpinan yang Integritas: Masyarakat mengharapkan pemimpin yang jujur, bersih dari korupsi, dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- 2) Pemimpin yang Berkompeten: Kemampuan untuk memimpin dengan efektif, mengambil keputusan yang bijaksana, dan mengelola pemerintahan dengan baik sangat diharapkan.
- 3) Kepemimpinan yang Inklusif: Pemimpin yang memahami keragaman Indonesia dan mampu mempersatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya dalam visi bersama.
- 4) Kepemimpinan yang Peduli terhadap Kesejahteraan Rakyat: Kemampuan untuk meningkatkan standar hidup rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik.
- 5) Kepemimpinan yang Memahami dan Mengatasi Isu Lingkungan: Kemampuan untuk memahami isu lingkungan, mengatasi perubahan iklim, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

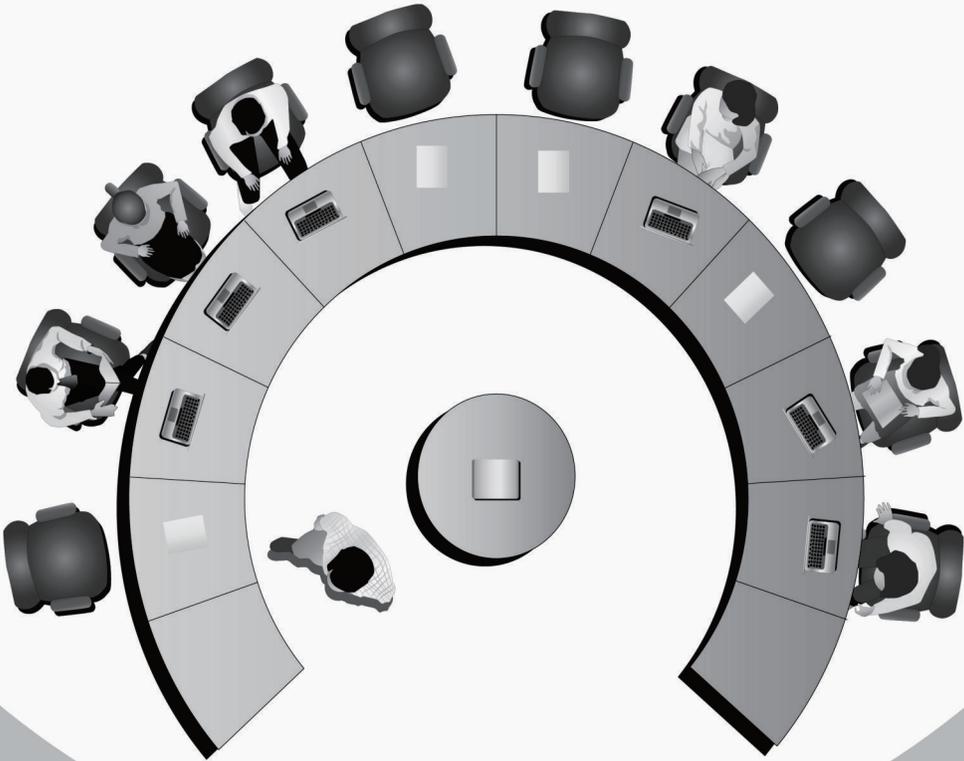
b. Strategi untuk Mengatasi Tantangan Mendatang:

- 1) Reformasi Birokrasi: Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang lebih baik dan pengurangan korupsi.
- 2) Pendidikan dan Keterampilan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan sosial.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta mendukung petani dan nelayan untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- 4) Perlindungan Lingkungan: Menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, mempromosikan energi terbarukan, dan melindungi sumber daya alam.
- 5) Perbaikan Kesehatan dan Layanan Sosial: Meningkatkan akses ke perawatan kesehatan berkualitas dan layanan sosial, terutama di daerah terpencil dan terpinggirkan.
- 6) Reformasi Hukum dan Kepolisian: Meningkatkan independensi dan efektivitas sistem peradilan serta meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian.
- 7) Diplomasi Regional dan Global: Terlibat aktif dalam diplomasi regional dan global untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, perdagangan internasional,

dan keamanan regional.

- 8) Kemajuan Teknologi: Mendorong inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup.
- 9) Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban politik mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis.
- 10) Pertahanan Nasional dan Keamanan: Meningkatkan pertahanan nasional dan keamanan siber untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman dalam dan luar negeri.

Mengatasi tantangan mendatang akan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Pemimpin yang berkualitas, visi jelas, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan akan memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan-tujuan ini.



BAB 7

KESIMPULAN

Kepemimpinan nasional di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang sejarah, dari Soekarno hingga Jokowi. Setiap pemimpin memiliki visi dan agenda kebijakan yang berbeda, yang telah memengaruhi negara dan masyarakat secara beragam. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan masalah lingkungan, ada juga banyak peluang yang dapat dijelajahi di masa depan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Kepemimpinan nasional selalu menjadi subjek penting dalam pembangunan Indonesia, dan harapan kita adalah bahwa pemimpin-pemimpin di masa depan akan mampu membawa negara ini menuju kemajuan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi semua rakyatnya.

a. Kepemimpinan Nasional Adalah Peran Utama Dalam Membimbing Negara Dalam Mencapai Tujuan Dan Mengatasi Tantangan Yang Dihadapi.

Berikut adalah beberapa poin kunci kepemimpinan nasional yang penting:

Seorang pemimpin nasional harus memiliki visi yang jelas untuk negara dan masyarakatnya. Kepemimpinan yang kuat dan berani dibutuhkan untuk mengartikulasikan dan mewujudkan visi ini. Pemimpin nasional harus menjaga integritas dan etika yang tinggi dalam tindakan dan keputusannya. Ini mencakup kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk mengambil tindakan yang benar, bahkan jika itu sulit.

Pemimpin nasional harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat berkomunikasi dengan rakyatnya, memotivasi, dan mempersatukan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan berdasarkan bukti

serta konsultasi dengan para ahli adalah hal yang krusial dalam kepemimpinan nasional. Pemimpin nasional harus mampu mengelola sumber daya dan birokrasi pemerintahan dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan nasional.

Pemimpin nasional harus mendorong inklusivitas, memerhatikan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya dalam kebijakan dan keputusan nasional. Kemampuan untuk memimpin dan mengambil tindakan tegas dalam situasi darurat atau krisis adalah aspek penting dari kepemimpinan nasional. Pemimpin nasional harus merasa bertanggung jawab kepada rakyatnya dan harus siap untuk akuntabilitas atas keputusan dan tindakannya.

Dunia selalu berubah, dan pemimpin nasional harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi tantangan baru. Seorang pemimpin nasional harus menjadi pemimpin pembelajar yang terbuka untuk masukan dan belajar dari pengalaman serta kesalahan masa lalu. Dalam era globalisasi, pemimpin nasional harus memiliki kemampuan diplomasi yang baik dan mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan bersama.

Pemimpin nasional harus menjadi sumber inspirasi bagi rakyatnya, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup. Pemimpin nasional yang sukses adalah mereka yang mampu menggabungkan sifat-sifat ini dengan baik dan menyesuakannya dengan kondisi dan tuntutan negara mereka. Kepemimpinan nasional yang kuat dapat membawa perubahan positif, stabilitas, dan kemajuan bagi negara dan masyarakatnya.

b. Perubahan kepemimpinan nasional di Indonesia memiliki dampak dan implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat.

Berikut adalah beberapa dampak dan implikasi umum dari perubahan kepemimpinan nasional Indonesia:

Perubahan kepemimpinan bisa berdampak pada dinamika politik dalam negara. Ini termasuk perubahan dalam koalisi politik, konflik politik, dan strategi pemilihan umum. Transisi ke kepemimpinan yang baru dapat menghasilkan ketidakstabilan politik sementara, terutama jika ada konflik atau perubahan besar dalam pemerintahan.

Pemimpin baru sering membawa perubahan dalam kebijakan publik dan prioritas nasional. Hal ini dapat memengaruhi sektor-sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Perubahan kepemimpinan nasional dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Ini termasuk kerja sama ekonomi, diplomasi, dan kebijakan luar negeri.

Ketidakpastian politik selama transisi kepemimpinan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Namun, pemimpin yang efektif juga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi.

Pemimpin baru dapat memiliki dampak signifikan pada perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum di negara tersebut. Perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hal ini termasuk integritas pemilihan umum, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Pemimpin nasional dapat membentuk budaya politik dan identitas nasional dengan

mempromosikan nilai-nilai tertentu dan menggarisbawahi aspek budaya, etnis, atau agama tertentu.

Pergantian kepemimpinan sering memotivasi masyarakat sipil dan aktivis untuk mengawasi pemerintah dan mendorong perubahan politik dan sosial. Kepemimpinan nasional dapat memengaruhi kebijakan perlindungan lingkungan, penanganan perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemimpin baru dapat memengaruhi strategi pertahanan nasional, kebijakan keamanan, dan penanganan konflik internal.

Dampak dan implikasi perubahan kepemimpinan nasional Indonesia sangat bergantung pada karakteristik dan kebijakan pemimpin yang baru, serta kondisi sosial-politik yang berkembang di negara tersebut. Pengaruhnya juga dapat bervariasi dalam jangka waktu yang berbeda, dari dampak jangka pendek hingga dampak jangka panjang yang lebih besar terhadap arah dan perkembangan negara.

c. Terdapat Banyak Pertanyaan Penting Yang Perlu Dijelaskan Lebih Lanjut Atau Diamati Di Masa Depan Terkait Indonesia.

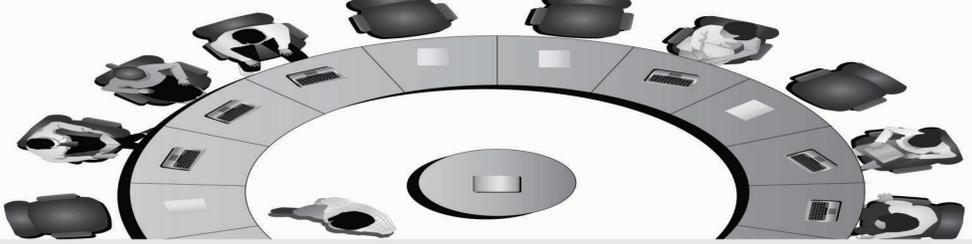
Berikut beberapa pertanyaan kunci yang mungkin perlu perhatian:

- 1) Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia akan terus berlanjut? Apakah ada potensi untuk peningkatan atau pengurangan demokratisasi?
- 2) Bagaimana Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif?
- 3) Bagaimana pengaruh perkembangan ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia?

- 4) Bagaimana Indonesia dapat memperkuat perlindungan lingkungan dan mengatasi tantangan perubahan iklim?
- 5) Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dapat seimbang dengan pelestarian lingkungan?
- 6) Bagaimana upaya-upaya dapat ditingkatkan untuk mengatasi ancaman keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri?
- 7) Bagaimana Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonomi, energi, dan pangan?
- 8) Bagaimana isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan, akses pendidikan, dan perawatan kesehatan dapat diatasi secara efektif?
- 9) Bagaimana pemerintah dapat mengatasi ketidaksetaraan regional dalam pembangunan?
- 10) Bagaimana Indonesia akan berinteraksi dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional dalam era globalisasi?
- 11) Apa peran Indonesia dalam diplomasi regional dan global?
- 12) Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memajukan ekonomi dan masyarakat?
- 13) Bagaimana masyarakat dapat diarahkan untuk menghadapi dampak transformasi digital?
- 14) Bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembangunan dapat ditingkatkan?
- 15) Bagaimana hak-hak individu dan kelompok dapat dijamin?

- 16) Bagaimana pemimpin nasional masa depan akan memimpin dan mengelola negara ini?
- 17) Bagaimana karakteristik kepemimpinan akan memengaruhi kebijakan dan arah negara?
- 18) Bagaimana sistem pendidikan dapat ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas?
- 19) Bagaimana pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat menghadapi tuntutan pasar kerja yang berubah cepat?
- 20) Bagaimana sistem perawatan kesehatan dapat ditingkatkan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat?
- 21) Bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk mengatasi krisis kesehatan masa depan?
- 22) Bagaimana perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dapat diperkuat dan ditingkatkan?
- 23) Bagaimana kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dapat diselesaikan secara adil?

Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan isu-isu yang akan menjadi perhatian penting bagi Indonesia dalam perjalanan masa depannya. Pemimpin, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terlibat lainnya perlu berkolaborasi untuk mencari solusi dan mengatasi tantangan-tantangan ini agar Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.



BIODATA PENULIS

Dr. R.M. Gatot Hery Djatmiko

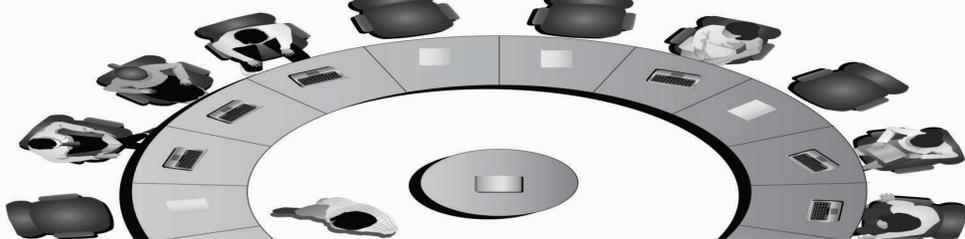
A. Riwayat Pendidikan:

1. Program Sarjana (S1)
 - a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Doktorandus (1986)
 - b. Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Sarjana Ekonomi (1998)
2. Program Pascasarjana (S2)
 - a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PWI – Magister Manajemen (1998)
 - b. Universitas Krisnadwipayana- Magister Ilmu Administrasi (200)
3. Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Doktor Ilmu Administrasi (2003)

B. Riwayat Mengajar

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

1. Program Studi Ilmu Administrasi FISIP 2000-2010
2. Program Pascasarjana, Magister Ilmu Administrasi Publik 2009-Sekarang



DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Shinzo. (2013). *Presentation by Prime Minister Shinzo Abe at the 125th. Session of the International Olympic Committee (IOC) (Speeches and.*
- Agustina, Dwi. (2017). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) DIY Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transparansi*. Volume 9 (1).
- Anwar, Muhkamat (2022) Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1S, (2022), Hal.343-356*
- Argenti, Gili dan Istiningdias, Dini Sri (2017) *Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2 No. 2 November 2017*
- Atmajaya, D. G., & Wirata, G. (2021). Peranan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring. *Widyanata*, 18(1).

- Balogh, S., et al., (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance* Journal of Public Administration Research and Theory. Oxford University Press.
- Cholisin. (2009). Mengembangkan partisipasi warga negara dalam memelihara dan mengembangkan sistem politik Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol.6 No.1
- Fakhriyah, R., Kencana, N., & Kariem, M. Q. (2022). Efektivitas Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pengembangan E-Government (Studi Kasus Aplikasi Sp4n Laporan! di Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 7(3)
- Farchan, Yusa' (2021) *Jurnal Adhikari*. Volume 1. No. 03. Januari 2022.
- Fathony, M. R., Muradi, & Sagita, N. I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demografi*, 9(2).
- Fazli Rachman. At. All. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol5. No.1. (2023). <http://abdi.ppj.unp.ac.id/index.php/abdi/article/view/316>
- Fosler, R.S. (2002). *Working Better Together: How Government, Business, and Profit Organizations Can Achieve Public Purposes Through Cross Sector Collaborations, Alliances,*

and Patnership. Washington DC, Disaster Prevention and Management, 13(2). Pp.140-152.

Hakim, Abdul (2012) <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/266/184>

Hartanto, Slamet B. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan. *Intelegensia. Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v3i2.1343>

Indah Rizki Aruma; Umamah, Nurul dan Marjono (2018) *Jurnal Historica*, Vol 2. Issue 1. Februari 2018. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/download/7813/5516/>

Irfan Hilmy dan Rama Halim Nur Azmi (2021). Konstruksi Pertahanan Dan Keamanan Negara Terhadap Perlindungan Data Dalam Cyberspace Untuk Menghadapi Pola Kebiasaan Baru. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9 No.1 (2021)

Irmaline Pakazeni F, dan Cindy Nabilla (2020) Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era Sby Dan Jokowi. *The Journalish: Social and Government*. Vol. 1. Nomor 5 (2020)

Jahidi, Ida dan Hafid, Moch (2020). Transformasional Leadership Dan Servant Leadership: Tantangan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Global. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3. Nomor.2.

Khasanah, U. (2019). Kepemimpinan transformasional dalam manajemen pendidikan islam. *Jakad Media Publishing*.

<https://books.google.co.id/books?id=SivZDwAAQBAJ>

Moch. Fauzie Said (2022) Strategi Kepemimpinan Krisis Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Untuk Pemulihan Ekonomi. Jurnal Penelitian Politik 2022. Vol. 19 no 2 <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/1221>

Mulyapradana, A., Anjarini, A. D., & Harnoto, H. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Tempo Cabang Tegal. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.115>

Mulyapradana, A. (2017). Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Pekalongan Timur. *Widya Cipta -Jurnal Sekretari Dan Manajemen*

Mutiawati T, Sudarmo, (2017). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*. Volume 1 (2).

Naim, Abu: (2014). Tipologi Kepemimpinan Politik Gusdur. Darussalam (Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam) . Vol. 1; <https://core.ac.uk/download/pdf/230913475.pdf>

Nainggolan, Poltak Partogi (2015). Kebijakan Poros Maritim Dunia, Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/312/246>

- Ridwan (2015) (Jurnal Pattingaloang: Volume 2. No.1 2015)
- Reproduksi Pengetahuan untuk kekuasaan: Analisis Wacana Kritis pada Artikel Ilmiah dan pidato Megawati Soekarnoputri. Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi bisnis: Perspektif Komunikasi . Vol.5. No. 2. 2021.
- Rohmat. (2020). Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi. Purwokerto: STAIN Press, hal. 66-69
- Putra, Sukarno Adam; Umamah, Nurul dan Sumarno (2019). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/10731>
- Salahudin Pakaya dan Amin Dali. Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia. At-Tanwir Law Review Volume 1, Nomor 1, Februari 2021, Halaman 74-95
- Shallahudin, M. Salman (2022) Shallahudin, M. Salman (2022). Perjalanan Pemberantasan Korupsi di Setiap Era Kepresidenan Indonesia. Departemen Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair. <https://politik.fisip.unair.ac.id/perjalanan-pemberantasan-korupsi-di-setiap-era-kepresidenan-indonesia/>
- Salman Yoga S. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 1 Januari – Juni 2018, 29 – 46
- Sekar, Aurellia at.all (2023) (https://www.academia.edu/40030571/Kebijakan_Politik_Luar_Negeri_Dari_Rezim_Sukarno_Hingga_Rezim_Joko_Widodo_Periode_Pertama diakses pada September 2023)

- Suryana. (2013). Kewirausahaan : Kiat dan Proses menuju sukses. Salemba Empat. Retrieved from http://lib.unika.ac.id/index.php?p=show_detail&id=50278&keywords=kewirausahaan
- Verah. at all (2023). Karakter Kepemimpinan yang ideal dalam sebuah organisasi. Jurnal Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen. Volume 4. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.35957/prmm.v4i2.4746>
- Widiatmaja, Aji dan Albab, Ulil (2019) Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional. Vol. 10. No.1 (2019)
- Yukl, G. (2010). Kepemimpinan dalam Organiasasi. Jakarta: Indeks, hal. 313

"Leadership in Public Administration Menuju Society 5.0" adalah buku atau konsep yang membahas peran kepemimpinan dalam menghadapi dan memanfaatkan konsep Society 5.0 dalam administrasi publik. Society 5.0 adalah konsep yang muncul dari Jepang yang menekankan integrasi teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, IoT (Internet of Things), dan big data, dalam kehidupan masyarakat dan administrasi publik untuk mencapai masyarakat yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Sinopsis mengenai "Leadership in Public Administration Menuju Society 5.0" dapat dijelaskan sebagai berikut:

Buku atau konsep ini membahas peran penting yang dimainkan oleh kepemimpinan dalam administrasi publik dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan konsep Society 5.0. Society 5.0 menciptakan paradigma baru di mana teknologi digital dan konektivitas mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan layanan publik.

Kepemimpinan dalam administrasi publik menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena mereka perlu memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi Society 5.0. Kepemimpinan yang efektif dalam administrasi publik akan mendorong inovasi, memastikan pelayanan publik yang lebih efisien, dan mempromosikan inklusivitas sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam era digital ini.

Konsep ini juga menyoroti pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi di administrasi publik. Kepemimpinan harus memastikan bahwa data pribadi dan hak warga dihormati sambil menjalankan transformasi digital.

Selain itu, "Leadership in Public Administration Menuju Society 5.0" membahas kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan Society 5.0. Ini melibatkan pengembangan kemitraan strategis dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

Kesimpulannya, buku atau konsep ini menyoroti peran penting kepemimpinan dalam administrasi publik dalam menghadapi era Society 5.0. Kepemimpinan yang kuat dan visioner diperlukan untuk memandu perubahan menuju pelayanan publik yang lebih canggih, inklusif, dan berkelanjutan, sambil menjaga etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi.



Penerbit Adab



@penerbitadab



www.PenerbitAdab.id

Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat

Telp. 081221151025 | penerbitadab@gmail.com

ISBN 978-623-162-404-8



9 786231 624048